

## **Intelktual Publik, Media, dan Demokratisasi**

### **Politik Budaya Kelas-Menengah\* di Indonesia**

Ariel Heryanto

BERTUMBUHNYA kelas-menengah perkotaan, yang merupakan gejala ikutan industrialisasi kapitalis dalam seperempat abad terakhir, tampak menonjol di berbagai masyarakat Asia. Hal ini telah kita maklumi bersama. Namun, di luar pengamatan umum itu, ada banyak perdebatan tentang gejala mutakhir ini yang belum terpecahkan, termasuk di antaranya pengertian yang tepat tentang apa yang disebut kelas-menengah itu sendiri, cara-cara mengkaji kelompok sosial ini, dan bobot peran mereka dalam ‘demokratisasi’ (istilah ini sendiri tidak kalah populer dan tidak kalah

---

\* Catatan penerjemah: Dalam naskah asli istilah ini secara konsisten digunakan dalam bentuk majemuk, *middle classes*, kecuali ketika frase ini berposisi sebagai *modifier* (yang menerangkan). Mengingat bentuk majemuk istilah ini dalam bahasa Indonesia kedengaran kurang lazim, maka saya terjemahkan menjadi ‘kelas-menengah’. Terjemahan dalam bentuk majemuk hanya saya lakukan pada bagian-bagian yang mendapat penekanan khusus.

problematisasinya). Menyadari kompleksitas persoalan ini, bab ini memfokuskan diri pada topik dan cakupan yang agak sempit. Sebagian besar uraian dalam bab ini terfokus pada dua kasus empiris di mana politik kelas-menengah, terutama dengan latarbelakang ekonomi dan sosio-kultural di Indonesia yang sedang mengalami industrialisasi, memberikan sumbangan yang berarti bagi tumbuhnya berbagai gugatan terhadap rezim otoriter Orde Baru (1966–1998). Kajian ini akan selalu diselingi perbandingan dengan situasi negeri tetangga Malaysia guna mempertajam isu yang dibicarakan.

Dua argumentasi utama akan membingkai diskusi berikut ini. Pertama, dalam kondisi tertentu intelektual publik kelas-menengah masyarakat pasca-kolonial dapat memainkan peran paling aktif dalam proses demokratisasi, walau mereka tidak selalu atau secara universal merupakan agen sejarah yang penting. Kondisi spesifik bagi peran aktif ini dapat dirumuskan sebagai terguncangnya masyarakat pasca-kolonial selama tahap-tahap awal industrialisasi kapitalis yang meluas dan berkesinambungan. Perubahan-perubahan ini penting karena mereka merongrong berbagai hal yang lazim berlaku, tetapi tidak cukup gencar dan kuat untuk menegakkan suatu tatanan sosial baru. Dalam situasi demikian, beberapa ciri produksi dan konsumsi kapitalis memang dominan, tetapi tidak menempati posisi yang hegemonik dalam lingkup moral, kultural, dan ideologis. Menyusun daftar sifat-sifat politis dan orientasi ideologis kelas-menengah dalam rumusan yang statis, menyeluruh, monolitik, atau deterministik jelas tidak mungkin dan tidak perlu. Berbagai segmen di dalam kelas-menengah, dengan sikap-sikap mereka yang beragam dan berubah-ubah, memberikan tanggapan berbeda-beda (Koo 1991: 486, 495, 499) terhadap

beragam proses demokratisasi yang secara inheren juga penuh kontradiksi (Goldfarb 1998: 6-8).

Kedua, sesuai dengan argumentasi di atas, akan lebih bermanfaat bila kita membahas secara rinci dinamika politik budaya kelas-menengah pada tingkat mikro, tanpa mengabaikan struktur yang lebih besar (nasional dan global) yang memungkinkan dan memaksakan batas-batas tertentu atas berbagai kemungkinan dinamika sosial ini. Bab ini tidak akan menyajikan gambaran besar tentang industrialisasi kapitalis di Indonesia dan Malaysia, atau menunjukkan bagaimana industrialisasi mempengaruhi kehidupan masyarakat yang dibicarakan. Para sarjana lain telah mencatat dengan baik gambaran besar semacam itu,<sup>1</sup> yang akan tetap ditempatkan sebagai latarbelakang bagi kajian dua kasus di Indonesia dan Malaysia di bawah ini. Fokus diskusi berikut ini adalah struktur dan aktor pada tingkat mikro, untuk menawarkan argumentasi bahwa suatu transisi demokratis dalam masyarakat pasca-kolonial akan berhasil bila kesadaran, gagasan, tindakan, dan institusi-institusi yang mesra dengan demokratisasi telah menemukan lahan subur dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari, termasuk di instansi-instansi, sekolah, keluarga, atau organisasi-organisasi sosial. Sebagaimana dicatat oleh Wright, beberapa di antara teori yang paling sistematis tentang kelas sosial, seperti yang dikembangkan oleh kaum Marxis, telah dibangun di atas “konsep-konsep struktur-makro yang sangat abstrak” (Wright 1989: 275-6). Dibutuhkan kajian tentang dialektika antara “bagaimana konteks struktural-makro menghambat proses-proses mikro, dan bagaimana berbagai pilihan pada tingkat mikro dan beberapa strategi individual dapat mempengaruhi rancangan struktural-makro” (Wright 1989: 276).

## Persoalan Kelas-Menengah

Dalam wacana publik di masyarakat yang didiskusikan di sini, ‘kelas-menengah’ dan ‘intelektual’ merupakan dua istilah bermasalah yang sering dicampur-adukkan. Bagian ini dan bagian-bagian selanjutnya akan mendiskusikan beberapa masalah penggunaan istilah-istilah ini. Akan juga dijelaskan mengapa di Indonesia dan Malaysia masalah ini sering dibiarkan dan istilah-istilah itu dicampur-aduk.

Beberapa pandangan yang saling berlawanan tetapi sama bermasalahnya terlanjur dominan dalam kajian kelas-menengah di Asia Tenggara. Ada yang berpendapat bahwa kelas-menengah dalam masyarakat ini (seharusnya) secara moral hebat atau progresif. Sejumlah pengamat lain menolak pandangan semacam itu dan secara esensial menganggap kelas ini konservatif dan sangat oportunistik. Di sini layak disajikan tinjauan pustaka yang rinci tentang kelas-menengah Indonesia dan Malaysia, tetapi hal ini tidak mendesak untuk bab ini.<sup>2</sup> Untuk kebutuhan kita di sini, hanya perlu disebutkan beberapa kelemahan dalam diskusi kelas-menengah Indonesia.

Pertama, selama ini ada asumsi yang kuat bahwa kelas-menengah merupakan kenyataan obyektif dan empiris yang keberadaannya dianggap bebas dari konstruksi teoretis pengamatnya (Crouch 1985; Mackie 1990; Robison 1986). Berbagai ukuran kuantitatif tentang jumlah kelas-menengah, kemakmuran dan kekayaan mereka, tingkat pendidikan, atau mobilitas mereka menjadi sebagian penampilan mereka yang kasat mata. Terkadang deskripsi empiris tentang gaya hidup mereka disajikan secara sangat rinci (Dick 1985; Oetomo 1989). Angka-angka dan deskripsi semacam itu memang menjadi bacaan memukau tetapi tidak banyak membantu

pemahaman mengenai sosok kelas-menengah itu sendiri. Celaknya angka-angka dan deskripsi itu mudah menyesatkan kita, karena mendorong kita untuk menyamakan individu, kelompok, institusi sosial, aktivitas, atau gaya hidup, merek barang-barang yang dikonsumsi, dan selera budaya tertentu dengan kualitas ke-kelas-menengah-an secara esensial dan ahistoris. Seperti kelas-kelas yang lain, kelas-menengah tak lain adalah bangunan konseptual yang bisa dipertahankan secara nalar, yang mengacu pada sesuatu yang tidak nyata: unsur dalam suatu struktur sosial.

Komentator yang lain, karena jenuh dengan kesulitan mencapai definisi kelas-menengah yang bisa disetujui secara minimal, memutuskan untuk membuang konsep itu secara total, atau menyatakan tidak adanya kelas-menengah ‘dalam arti yang sebenarnya’ di Indonesia. Wacana anti-komunisme, yang begitu dominan di kawasan ini selama Perang Dingin, telah ikut bertanggungjawab atas miskinnya analisis kelas dalam kajian Indonesia dan Malaysia dewasa ini. Situasi ini antara lain juga akibat dominasi empirisisme berdosisi tinggi dalam ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan di Amerika Serikat sesudah Perang Dunia II.

Kelemahan kedua yang besar dalam kepustakaan tentang kelas-menengah Indonesia bersumber dari kebiasaan selama ini untuk memahami ‘kelas-menengah’ sebagai sesuatu yang tunggal. Karya-karya Erik Olin Wright (1987, 1989) dan sarjana-sarjana lain (misalnya Abercrombie dan Urry 1983) membantu kita mengenali pentingnya memahami konsep itu secara jamak: kelas-kelas-menengah. Ini bukan sekadar persoalan jumlah, ukuran, atau keragaman. Kelas-menengah bukan hanya terdiri atas unsur-unsur yang berbeda tetapi juga saling berlawanan. Bisa saja ada kelas-menengah progresif,

tetapi bisa juga ada kelas-menengah yang sangat konservatif, oportunis atau apatis dalam negara-bangsa yang sama karena berbagai alasan yang secara historis bersifat khusus. Yang lebih memperumit persoalan, setiap kelompok dari kelas-kelas ini mungkin saja memberikan tanggapan politik yang berbeda pada momen yang berbeda dalam dinamika demokratisasi yang kompleks. Demokratisasi bisa sama jamaknya dengan kelas-menengah itu sendiri (Koo 1991: 486).

Pemahaman pluralis tentang kelas-menengah yang saling berlawanan sangat membantu diskusi tentang Indonesia dan Malaysia, di mana kapitalisme industrial yang telah mempopolarisasikan kelas ke dalam penggolongan yang lebih tegas juga diperumit dengan terbelah-belahnya masyarakat berdasarkan perbedaan etnis dan agama, seperti yang meledak dalam berbagai konflik penuh kekerasan di beberapa pulau di Indonesia sejak akhir 1990-an (lihat Bertrand 2001). Dengan demikian bisa dimengerti bila makna identitas yang beragam dikaji secara hati-hati di dalam semua bab buku ini. Berlawanan dengan mitos-mitos populer yang terlalu romantis tentang kelas-menengah yang serba baik, pejuang kebenaran dan bersikap demokratis sebagaimana telah menjadi dominan dalam wacana publik, diskusi akademis (terutama di kalangan sarjana asing) tentang kelas-menengah Indonesia cenderung mengecilkan hati atau meremehkan. Akan tetapi hal ini tidak selalu disajikan dengan niat mencela.<sup>3</sup> Pandangan seperti itu didukung oleh berbagai kelompok akademikus yang mungkin saling berlawanan dalam isu-isu lain. Pada satu titik ekstrem dapat dijumpai William Liddle, seorang ilmuwan politik Amerika yang pluralis-liberal dan anti-Marxis, yang mengagumi prestasi-prestasi Orde Baru Soeharto yang militeristik, dan, seperti halnya rezim Orde Baru, percaya bahwa kelas-

menengah sangat bahagia mendukung rezim ini (lihat Liddle 1990). Di titik ekstrem lain terdapat Richard Robison, seorang ekonom-politik Australia dan salah seorang sarjana yang pertama menggunakan analisis Marxis dalam membahas industrialisasi kapitalis Orde Baru. Sebelum berubah sikap belakangan ini (Robison 1996:84-8), penilaiannya tentang orientasi politik kelas-menengah Indonesia terbilang mere-mehkan (Robison 1986, 1990).

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan bermasalah yang lazim diajukan untuk menolak pentingnya politik kelas-menengah. Beberapa pengamat berpendapat bahwa jumlah kelas-menengah terlampau kecil untuk mampu mempengaruhi perubahan sosial yang besar (seakan-akan sejarah dunia menunjukkan bahwa perubahan sosial ditentukan oleh jumlah orang yang menghendaknya). Mereka juga berpendapat bahwa kelas-menengah Indonesia terlampau bergantung pada perlindungan negara, oportunis dan egois (seakan-akan perubahan sejarah selalu dipimpin pahlawan yang baik hati, dan seakan-akan kelas-kelas sosial yang lain, termasuk kelas-menengah Barat, tidak egois). Selain itu, mereka mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia tidak menyerupai pengalaman Eropa (seakan-akan industrialisasi di Indonesia harus serupa dengan pengalaman Eropa). Akhirnya, dengan menyamakan atau membandingkan kelas-menengah Asia mutakhir dengan kaum borjuis Eropa yang muncul pada tahap awal industrialisasi, beberapa pengamat menyatakan bahwa kelas-menengah Indonesia secara politis tidak bisa diharapkan karena kelas bisnis di bawah rezim Orde Baru umumnya berasal dari etnis Cina dan karena itu berstatus pariah. Pada umumnya, karena kurang tertarik atau karena kurang terlatih tentang politik budaya, para pengamat ini mengabaikan

politik gerakan mahasiswa dan intelektual publik yang dari segi jumlah memang tidak besar.

Dalam bahasan berikut ini, kelas-menengah saya bicarakan dengan sadar sebagai tanggapan terhadap pandangan dominan sebagaimana dipaparkan di atas. Walau saya akui bahwa tak ada istilah semacam ‘kelas-menengah’ yang mungkin dapat menunjukkan suatu kenyataan yang tak berubah, dan memiliki batasan yang jelas dan nyata, saya berpendapat bahwa istilah ini bisa dipertahankan meski hanya sementara. Ini merupakan istilah populer yang bermakna dalam masyarakat yang dikaji dan merupakan bangunan ilmiah sosial yang berguna, yang disusun (betapapun tidak sempurna) berdasarkan tindakan-tindakan dan pengejawantahan struktur sosial yang secara empiris bisa diamati. Konsep ini menampung identitas dan tindakan yang jamak, ada yang progresif ada yang tidak, yang berubah dan berbalik bersama dengan perubahan waktu, sebagaimana dibahas dalam Bab 6 dan 7. Yang lazim sama pada semua ragam kelas-menengah (tanpa kesamaan ini mereka samasekali tak bisa disebut kelas-menengah) adalah kiblat atau ikatan mereka pada gabungan beberapa hal berikut ini: tinggal di perkotaan; pekerjaan dan pendidikan modern; dan selera budaya, yang tampil secara mencolok, tetapi tidak semata-mata, dalam konsumsi gaya hidup. Secara ekonomi, orang-orang dalam kelas-menengah ini menduduki posisi yang jelas berbeda dari mereka yang lazim disebut kelas pekerja. Mereka juga berbeda dari kelompok yang paling diuntungkan dalam tatanan sosial yang ada berkat kekuasaan ekonomi atau birokratis mereka yang besar.<sup>4</sup> Dimensi ekonomi ini penting, namun sebagaimana secara mendalam diingatkan oleh Joel Kahn (1996b), tidak cukup sebagai satu-satunya tolok ukur sifat kelas-menengah,



terutama untuk unsur-unsur kelas-menengah yang secara politik lebih aktif.<sup>5</sup>

Mayoritas wartawan, mahasiswa dan dosen, seniman, pengacara, aktivis organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) dan banyak yang lain di Indonesia dan Malaysia dewasa ini sering diidentifikasi sebagai kelas-menengah. Acuan pada kekhususan waktu (dewasa ini) dan ruang (Indonesia dan Malaysia) menjadi penting karena kita tidak ingin menghubungkan posisi kelas secara ahistoris dan abstrak. Kelompok-kelompok sosial yang sama juga telah lazim dianggap sebagai sosok utama, nyaris satu-satunya, kaum 'intelektual' dengan alasan yang akan saya bahas dalam bagian berikut ini. Dari segi ekonomi, jurnalis dan akademikus pasca-kolonial mungkin menduduki posisi yang tidak jauh berbeda dari kaum profesional bergaji lainnya, termasuk pejabat negara peringkat tengah dan perwira menengah. Tetapi, secara kultural dan politik, ada perbedaan yang penting antara berbagai kelompok kelas-menengah ini. Jurnalis, akademikus, atau seniman bekerja terutama dalam produksi simbol-simbol (baca: kata-kata dan citra-citra yang berwibawa). Mereka diharapkan atau dianggap bekerja dengan otonomi, inovasi, integritas, dan kreativitas dan terkadang subversi. Karena tuntutan ini, mereka membedakan diri (dan dibedakan oleh khalayak) dari sosok pejabat militer, pejabat negara atau kaum profesional dalam dunia usaha, yang dituntut atau mengaku memiliki sederet kualitas yang berbeda.

Jadi, pengertian 'kelas-menengah' dalam bab ini bukan sekadar kategori ekonomi. Bab ini memfokuskan diri pada segmen khusus dalam kelas-menengah yang menguasai produksi karya-karya intelektual dan kultural, dan menguasai

posisi sebagai ‘intelektual’ publik. Dengan demikian baik ‘kelas-menengah’ maupun ‘intelektual’ dalam bahasan berikut lebih baik dimengerti sebagai konsep-konsep diskursif, ideologis dan mitis ketimbang sebagai deskripsi yang murni empiris dari sejumlah individu yang secara biologis ada dengan nama, profesi, pola-pola konsumsi atau afiliasi kelembagaan yang spesifik. Bagian berikut ini akan menguraikan unsur-unsur ekonomi dan kultural dari sosok ideologis ini. Perbedaan berbagai kelas sosial dapat dibandingkan dengan nama-nama warna. Warna ada dalam dunia nyata dan dalam pikiran sang pengamat, tetapi perbedaan berbagai warna di dunia ini tidaklah seketat yang dilihat dan dinamai dengan sejumlah istilah oleh sang pengamat. Seperti berbagai konsep penting lainnya, istilah kelas-menengah dibentuk sekaligus membentuk identitas, institusi, dan tindakan sosial yang beragam yang tadinya ingin dipersoalkan.

### **Intellectual Publik Pasca-Kolonial**

Berlawanan dengan sikap meremehkan dari banyak sarjana Barat terhadap kelas-menengah Indonesia atau Malaysia, sebagian besar masyarakat di luar masyarakat borjuis dan demokratis liberal kapitalis ‘Barat’ cenderung memberikan penghargaan lumayan tinggi kepada ‘intelektual’ kelas-menengah. Ini juga terjadi di Indonesia dan Malaysia. Apakah penghargaan semacam itu pantas atau tidak merupakan persoalan lain. Basis otoritas kaum intelektual ini beragam, dari masalah agama dan seni hingga pengetahuan ilmiah sekuler. Di Indonesia dan Malaysia dewasa ini beberapa dari kaum intelektual itu berkecimpung dalam jurnalisme, dunia akademik, seni, atau kepemimpinan agama.

Harus diakui, uraian di atas merupakan generalisasi yang luas. Penghargaan terhadap intelektualisme dan mitos-mitos tentang hal itu dalam masyarakat industri kapitalis Barat cukup beraneka-ragam, dengan Prancis pada satu titik ekstrem di mana kaum intelektual menikmati penghargaan yang relatif tinggi atas pemikiran filosofis abstrak dan elitis mereka. Di lain pihak di Inggris dan Amerika Serikat intelektualisme populis lebih menonjol (Goldfarb 1998: 8). Demikian juga agaknya ada tuntutan maupun mitos yang lebih kuat tentang aktivisme intelektual di Indonesia daripada di Malaysia dewasa ini—seperti dicatat Bab 5—karena alasan-alasan yang tidak perlu segera dibahas di sini.<sup>6</sup> Derajat kecurigaan para pejabat negara terhadap kaum intelektual dan harga diri kaum intelektual beragam di negara-negara Asia, baik yang kapitalis maupun sosialis. Bahkan di dalam suatu negara-bangsa pun, status kaum intelektual tidak pernah statis. Tidak semua akademikus, pengacara, seniman, atau jurnalis mendapatkan pengakuan publik yang setara sebagai ‘intelektual’ karena ‘kinerja’ mereka yang berbeda. Meskipun ada keragaman, generalisasi yang luas di atas tetap berguna karena alasan-alasan yang akan diuraikan berikut ini.

Tidak seperti anggota kelompok yang berkuasa, kaum intelektual harus menjaga jarak—sekurang-kurangnya dalam penampilan publik—dari kelompok-kelompok sosial yang paling berkuasa dan berharta dalam masyarakat mereka. Nama baik dan kewibawaan mereka tergantung pada sejauh mana mereka menjaga jarak dari kegiatan-kegiatan yang tampak terutama mendatangkan imbalan baik material maupun non-material. Citra publik inilah yang membedakan mereka dari birokrat negara atau kelas bisnis yang sedang bertumbuh, walau kekayaan atau pendapatan mereka mungkin tidak

terlalu berbeda. Tetapi, jarak dari kelompok yang secara politis atau ekonomi paling berkuasa tidak pernah total atau ekstrem. Kaum intelektual sering menikmati kehidupan dan perlindungan yang menyenangkan, entah secara langsung dari kelompok yang paling berkuasa atau berharta di dalam masyarakat, atau secara tidak langsung dari ketimpangan tata sosial yang ikut menguntungkan mereka.

Sebagaimana layaknya orang lain, kaum intelektual dalam masyarakat pasca-kolonial tidak selalu enggan menerima harta dan kuasa. Yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok sosial lainnya adalah perlunya klaim umum dan pengakuan masyarakat bahwa mereka mengabdikan pada upaya mencari kebenaran, keadilan, etika, atau keindahan lebih daripada yang lain. Komitmen semacam itu harus tampil tegar melawan godaan kompromi demi pamrih dan imbalan material duniawi. Jadi, selalu ada kebutuhan inheren untuk menyangkal status istimewa, pamrih pribadi, atau nafsu dipuji, dan terkadang terselubungnya gairah mereka terhadap kekuasaan dan kekayaan.

Tidak seperti kaum jelata, intelektual pasca-kolonial tidak harus menjual tenaga kasar untuk bertahan hidup. Mereka tidak harus bekerja secara permanen dalam lingkungan kerja yang paling berbahaya, kotor, dan sulit karena tuntutan mencari nafkah. Beberapa dari mereka bersedia bekerja seperti itu sebagai relawan, dan untuk itu mereka biasanya meraup pesona publik, pengakuan istimewa dan penghormatan besar, jika bukan imbalan material yang besar. Hal ini bukan berarti bahwa apapun yang mereka kerjakan selalu diperhitungkan dengan sadar untuk meraih pamrih pribadi. Namun, untuk bekerja secara efektif, aktivis kelas-menengah harus bekerja secara publik; sehingga kerelawanan

heroik mereka sering mengundang pujian publik, bahkan mungkin lebih daripada itu. Dalam konteks itulah muncul julukan ‘intelektual publik’. Jika aktivisme ini ternyata teramat sulit, para aktivis itu bisa sewaktu-waktu memilih untuk “pulang kampung” ke kondisi kehidupan kelas-menengah mereka yang nyaman (lihat Bab 5). Meskipun berbeda dari kaum jelata, kaum intelektual harus tampak berpihak kepada kaum jelata.<sup>7</sup>

Dua ironi lazimnya inheren dalam posisi subyek pasca-kolonial, sebagaimana dialami oleh kaum intelektual di Indonesia dan Malaysia. Pertama, kaum intelektual mendapatkan kuasa gara-gara berbagai derita yang mereka alami akibat penindasan pemerintah yang justru dimaksudkan untuk menghabiskan kuasa semacam itu. Sebagaimana telah diketahui umum, pelarangan pemerintah sering malah mempromosikan ketimbang menindas peredaran dan penjualan karya-karya sastra, seni, atau jurnalistik dan ketenaran pengarang atau penulisnya. Penghormatan yang luarbiasa terhadap novelis Pramoedya Ananta Toer sedikit banyak terkait dengan ketegarannya melawan penindasan terhadap dirinya yang seolah-olah tiada akhir oleh rezim yang muncul silih berganti di Indonesia. Sepenuhnya menyadari hal ini, pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak melarang novel *Shit* [Tinja] karya pengarang nasional Shahnnon Ahmad, walau jelas novel itu merupakan sindiran tajam terhadap Perdana Menteri Mahathir Mohamad (lihat Chen 1999; Krishnan 1999; Bab 7). Pengalaman ditahan polisi sering malah mengundang penghargaan dan meningkatkan bobot kewibawaan aktivis muda di kalangan mahasiswa Indonesia.<sup>8</sup>

Ironi kedua adalah bahwa kaum intelektual bertingkah menggugat dan merongrong *status quo* yang justru telah

memberi mereka status dan otoritas istimewa yang memungkinkan tindakan langka itu. Ada peribahasa, anjing tak akan menggigit tangan tuannya yang memberinya makan. Intelektual dalam masyarakat pasca-kolonial justru diharapkan menggigit tangan itu. Paling tidak, mereka harus mengklaim atau pura-pura ingin menggigit cukup keras. Apakah kaum intelektual benar-benar melakukannya atau tidak, dan kapan mereka berbuat demikian, dapat diperdebatkan. Dengan demikian, kedudukan istimewa intelektual pasca-kolonial tidak semata-mata dapat dikenal dalam kerangka ekonomi-politik struktural. Arti penting mereka juga terus-menerus dicatat dan dimitoskan dalam ingatan publik dan narasi resmi.

Berbagai tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa besar di Indonesia dan Malaysia pada perubahan milenium memberikan contoh yang bagus. Ketika Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilucuti kekuasaannya pada September 1998, banyak pengamat bertanya-tanya apakah Malaysia akan mengikuti berbagai peristiwa di Indonesia yang berlanjut dengan jatuhnya kepala pemerintahan yang telah lama memerintah, yakni Mahathir. Walaupun jawaban mereka berbeda-beda, banyak yang terpasung pada logika umum determinisme ekonomi, yang menyatakan bahwa kemampuan Malaysia untuk bertahan di tengah kesulitan-kesulitan ekonomi pasca-1997 membantu menstabilkan bangsa itu, melindungi *status quo*, dan melemahkan upaya-upaya populis untuk menantang Sang Perdana Menteri. Banyak pengamat meramalkan bahwa kelas-menengah di Kuala Lumpur tidak akan mengambil risiko kehilangan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh *status quo*, betapapun marahnya mereka terhadap pemerintah yang berkuasa atau betapapun ber-

simpatinya mereka kepada Anwar. Dalam periode waktu yang kurang lebih sama, gerakan mahasiswa Indonesia dipuji secara luas atas peran mereka turut menciptakan guncangan politik yang mendorong pengunduran diri Presiden Soeharto yang historis. Tetapi, anehnya, tidak ada upaya sistematis untuk menjelaskan apa yang telah mendorong atau memberdayakan kaum muda perkotaan yang berani ini. Seakan-akan gerakan mereka itu wajar dan normal. Kenyataannya, dalam tahun-tahun sebelumnya, aktivis mahasiswa hampir selalu diabaikan dalam analisa arus-utama politik Indonesia.

Sejarah kedua masyarakat sesungguhnya lebih kompleks dan berwarna-warni daripada apa yang diutarakan dalam pandangan dominan. Selama beberapa bulan pada akhir 1998, ribuan orang Malaysia turun ke jalan-jalan, dan bentrok dengan aparat keamanan negara. Namun, mereka melakukannya tidak secara habis-habisan atau untuk jangka panjang. Setelah mereka mengundurkan diri dari konfrontasi jalanan pada awal 1999, tidak jelas apakah mereka telah berhenti dari segala bentuk aktivisme politik, menjadi apatis, atau mengabsahkan *status quo*. Kondisi ekonomi dalam kasus ini memang merupakan faktor penting, tetapi tidak bisa menjelaskan banyak hal. Bab ini mencoba melihat bagaimana pengalaman berada dalam suatu kondisi ekonomi tertentu telah dipahami, diterjemahkan, diperumit, dan diselingi dengan kekuatan-kekuatan non-ekonomi di kalangan profesional kelas-menengah pada dasawarsa 1990-an.

Dalam contoh peristiwa yang lain, Profesor Chandra Muzaffar, salah seorang aktivis sekaligus intelektual ternama di Malaysia, kehilangan jabatan di universitas tertua di Malaysia, yakni Universitas Malaya, dengan berakhirnya kontrak tahunan pada 28 Februari 1999. Chandra berpendapat, dan

sebagian besar pengamat percaya, bahwa alasan yang sesungguhnya bagi keputusan universitas itu bersifat politis.<sup>9</sup> Chandra selama bertahun-tahun menjadi pengkritik terkemuka pemerintahan Mahathir, terutama dalam bulan-bulan genting setelah Anwar ditahan. Banyak responden saya selama penelitian pada akhir Februari 1999 mengatakan bahwa jabatan Chandra di Universitas Malaya merupakan bagian proyek kerjasama yang lebih luas dengan Anwar, yang waktu itu tampaknya akan menjadi pewaris kekuasaan Mahathir. Ketika Anwar ditahan, istrinya, Dr Wan Azizah Wan Ismail menggalang dukungan massa untuknya dengan mendirikan organisasi non-pemerintah yang disebut Gerakan Keadilan Sosial, yang lebih populer disebut ADIL, pada 19 Desember 1998. Chandra ditunjuk sebagai Wakil Ketua.

Dua minggu setelah Chandra dicopot dari jabatannya, pemimpin Universitas Malaya membatalkan suatu forum yang mestinya diselenggarakan di lingkungan kampus oleh beberapa intelektual yang sadar politik sebagai bagian sidang umum tahunan *Malaysian Social Science Association* (MASSA). Forum itu dimaksudkan untuk mendiskusikan “Tantangan-tantangan terhadap Intelektual Malaysia Dewasa ini”. Chandra merupakan salah seorang pembicara yang diundang. MASSA mengecam pembatalan itu, dan menyelamatkan berlangsungnya acara diskusi yang dibatalkan itu dalam mata-acara “hal-hal lain” (lihat Mandal 1999a; Zain 1999). Para hadirin mengungkapkan keprihatinan bersama terhadap sikap bungkam komunitas intelektual Malaysia dalam menghadapi ketidakadilan yang sedemikian gamblang. Konon Chandra mengajukan pertanyaan yang juga menjadi kepedulian banyak hadirin: “Mengapa tidak ada reaksi?



...Mengapa kaum akademikus tidak berhenti mengajar sebagai tanda protes? Mengapa para politisi tidak mengundurkan diri? Mengapa para hakim bungkam?” (Zain 1999).<sup>10</sup>

Secara moral pertanyaan-pertanyaan ini bagus dan sepele, namun sah-sah saja dalam konteks pada saat diucapkan. Tetapi, dalam bab ini pertanyaan-pertanyaan itu layak dianalisa secara kritis. Mengapa kaum akademikus, politisi, atau hakim ‘seharusnya’ meletakkan jabatan mereka demi keadilan dan kebenaran di Malaysia atau di manapun dewasa ini? Bahkan sekalipun mereka melakukan tindakan, apakah akan ada bedanya? Di balik pertanyaan-pertanyaan Chandra itu terbersit asumsi bahwa yang seharusnya terjadi berbeda; dan itu bisa terjadi atau pernah terjadi di Malaysia (dulu atau kini) atau di luar Malaysia.<sup>11</sup> Asumsi semacam ini begitu lazim di Malaysia dan Indonesia. Sejarah anggapan itu akan diamati di sini.

Dalam angan-angan maupun kenyataan, politik budaya kaum intelektual kelas-menengah di luar masyarakat Barat kapitalis cukup penting. Hal ini telah terbukti dengan berbagai upaya serius rezim yang berkuasa, entah untuk memperoleh legitimasi kaum intelektual semacam itu, maupun untuk menindasnya bila semua upaya merangkul mereka terbukti gagal. Tidak kebetulan dalam beberapa bulan pertama 1999, *United Malays National Organization* (UMNO)—anggota utama koalisi yang berkuasa di Malaysia—secara mati-matian meluncurkan serangkaian propaganda dengan sasaran kaum terpelajar dengan cara-cara yang mirip Orde Baru. Melalui media massa yang dikontrol ketat oleh pemerintah, para pejabat negara Malaysia terus-menerus menyebarkan ketakutan kepada khalayak dengan melontarkan gagasan bahwa

ada beberapa guru sekolah menengah melakukan tindakan makar dengan menanamkan kebencian terhadap pemerintah di kalangan para siswa. Sejak 1999 para mahasiswa baru diwajibkan menghadiri serangkaian program propaganda pemerintah, mirip dengan penataran Pancasila (ideologi negara Orde Baru) dalam dasawarsa 1980-an. Walaupun kebebasan berbicara telah cedera di banyak masyarakat di segala penjuru dunia, di luar masyarakat kapitalis Barat masih banyak kasus pendakwaan (dan pembedaan) terhadap para pengarang fiksi, tahanan politik (menjadi tahanan karena menyuarakan hati nuraninya), pelarangan dan pembakaran buku-buku, serta pendakwaan dan pembedaan terhadap warganegara yang “kejahatannya” berupa memproduksi teks dan citra.

Kontras perbandingan antara kaum intelektual ‘Barat’ di bawah hegemoni borjuis dan demokratis-liberal dan mereka yang berada dalam masyarakat pasca-kolonial sebagaimana disebutkan di atas mungkin terlampaui sederhana. Satu alasan perlunya perbandingan semacam itu adalah untuk memberikan latarbelakang tentang peristiwa-peristiwa yang akan saya bahas dalam beberapa bagian berikut ini. Alasan lain, yang ironis, adalah untuk menunjukkan dalam bagian-bagian selanjutnya bahwa kontras semacam itu secara perlahan-lahan, tetapi berkelanjutan, menjadi kabur, walau tidak sepenuhnya lenyap.

Dua kejadian pada 1994 yang dikaji di bawah ini menunjukkan bahwa pembangunan kapitalis yang berkelanjutan di Indonesia di bawah kondisi global yang kondusif ternyata menggerogoti mitos-mitos lama tentang ke-resi-an kaum profesional dalam produksi kebenaran dan keadilan. Semakin lama intelektual kelas-menengah semakin kurang bergantung

pada citra yang telah mapan sebagai sosok tanpa-pamrih, semakin lama mereka semakin cenderung mengejar dan menempatkan kepentingan-kepentingan mereka dalam mekanisme yang lebih modern—terkadang sekuler, terkadang religius—dan terlembaga. Agenda dan tuntutan baru ini belum tentu pilihan bebas mereka. Alih-alih, hal itu dipaksa oleh konstelasi baru kesempatan pasar. Namun, ini tidak berarti bahwa kalkulasi rasional dan ekonomi tentang untung-rugi mendikte segala-galanya. Di Indonesia dan Malaysia menguatnya kesadaran kapitalis ini relatif baru. Kebingungan, kegamangan, ketidak-konsistenan, penyangkalan, kebingungan, dan ambiguitas melebur dan bersaing dengan janji-janji lama tentang modernitas, keyakinan, dan cita-cita baru. Semuanya itu menandai politik kelas-menengah dewasa ini.

Dua konflik pada 1994 menyedot perhatian khalayak Indonesia. Jika ditinjau ke belakang, kedua peristiwa ini tampaknya merupakan semacam pendahuluan terhadap gejala yang melanda seluruh negeri menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto yang dramatis pada 21 Mei 1998. Kedua peristiwa ini juga secara langsung membawa kita kembali pada beberapa pertanyaan yang muncul di Malaysia setelah kontrak kerja Chandra Muzaffar tidak diperpanjang. Salah satu dari kedua peristiwa ini adalah konflik internal di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Kejadian lain dan yang tampak terpisah adalah gelombang gerakan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri sebagai tanggapan terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru mencabut Surat Izin Usaha Pers dan Penerbitan (SIUPP) tiga mingguan terbitan Jakarta, yakni *TEMPO*, *Editor*, dan *DèTIK*.

## Satya Wacana: Ironi Kesuksesan

Terletak di kota kecil Salatiga di jantung Jawa Tengah yang berpegunungan, UKSW mengawali sejarahnya sebagai lembaga yang sederhana dan kurang dikenal. UKSW didirikan pada 1956 sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan guru sekolah menengah di sekolah-sekolah Kristen yang bersebaran di seluruh Indonesia. Hingga 1970, kehidupan kampus sangat komunal dan keberadaannya hampir-hampir tidak mendapat perhatian penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Dalam dua dasawarsa berikutnya, universitas yang kecil dan *adem-ayem* ini bertumbuh jauh lebih pesat daripada yang pernah dibayangkan para pendirinya. Perkembangan ini terjadi dalam konteks pembangunan ekonomi-politik yang lebih luas di Indonesia di bawah kediktatoran militer Orde Baru serta ekspansi kapitalisme global selama Perang Dingin.<sup>12</sup>

Pada 1970-an perkembangan infrastruktur dan administrasi kampus sungguh menakjubkan, berkat dukungan berbagai lembaga donor asing dan terutama lembaga-lembaga Kristen. Konon pada saat itu perpustakaan universitas ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Pada 1980-an UKSW dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi Indonesia terbaik dan paling disegani. Hal ini menjadi daya tarik bagi sejumlah akademikus terkemuka Indonesia dan para mahasiswa yang cerdas untuk bergabung; dan kehadiran mereka ini selanjutnya turut serta mengangkat reputasi UKSW. Interaksi dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi asing meningkat pesat, dan mendorong kehidupan kampus yang hebat dalam bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Dalam pertengahan 1980-an, di antara sekitar 300 universitas swasta di Indonesia UKSW menjadi perguruan tinggi swasta

pertama yang diizinkan menyelenggarakan program pascasarjana berakreditasi.

Dengan pesatnya perkembangan UKSW, sejumlah konsekuensi negatif muncul secara tak terelakkan. Persyaratan masuk menjadi semakin ketat, dan uang kuliah semakin tak terjangkau oleh mayoritas lulusan sekolah menengah atas.<sup>13</sup> Terlepas dari reputasi akademiknya, UKSW dalam periode ini juga tenar dalam hal lain. UKSW sering membanggakan diri sebagai contoh miniatur Indonesia yang multikultural. Dalam upaya mempertahankan ikatan sejarahnya dengan gereja-gereja pendukung di seluruh Indonesia, pengurus universitas menerapkan sistem kuota untuk secara proporsional menampung para mahasiswa yang disponsori oleh gereja-gereja di seluruh penjuru tanahair, terkadang dengan berkompromi dalam hal prestasi akademik mereka. Kebijakan afirmatif ini mendapat pembenaran pada kebutuhan untuk mengoreksi ketimpangan industrialisasi yang dipimpin negara, yang mengutamakan Jawa (yang merupakan pulau dengan proporsi penduduk terbesar di Indonesia) di atas pulau-pulau lainnya, yang banyak di antaranya kaya akan sumberdaya alam dan merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Program matrikulasi khusus diselenggarakan untuk membantu para mahasiswa yang secara akademis agak tertinggal—dan mereka umumnya berasal dari daerah-daerah yang dirugikan—agar bisa mengejar para mahasiswa lain yang berasal dari kota-kota besar di Jawa.

Hasilnya, UKSW menjadi salah satu universitas yang secara etnis dan bahasa paling beragam di seluruh negeri. UKSW merupakan salah satu dari sedikit perguruan tinggi di Indonesia di mana bahasa nasional Indonesia, bukannya salah satu dari bahasa daerah dan bahasa ibu, menjadi bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Walaupun terletak di

Jawa, mahasiswa beretnis Jawa tidak pernah mencapai separuh jumlah total mahasiswa UKSW. Tidak seperti situasi di sejumlah perguruan tinggi swasta dan Kristen yang mahal, jumlah mahasiswa keturunan Cina selalu di bawah mahasiswa etnis Jawa.<sup>14</sup>

Perlu diakui, multikulturalisme ala UKSW dapat dipahami dalam pengertian kolonial, yang dicirikan dengan eksotika keragaman etnis. Yang luput dari pengamatan banyak orang, UKSW juga menjadi Indonesia mini dalam pengertian yang lebih luas daripada sekadar di permukaan dan eksotik demikian. UKSW juga menjadi Indonesia mini dalam pengertian lain yang lebih berbahaya—secara kultural, politis, dan ekonomi. Meskipun berupaya menolak, UKSW menjadi obyek berbagai tekanan baik dari aparat negara yang represif dan intervensionis maupun dari pragmatisme ekonomi akibat ekspansi kapitalisme industrial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Derajat tekanan intervensionis semacam itu, dan perlawanan Universitas terhadapnya, berbeda-beda dari waktu ke waktu. Namun, hasil akhirnya tidak samar-samar—UKSW semakin kehilangan otonomi dengan bertumbuh besar dan semakin masuk ke dalam pengelolaan rezim Orde Baru yang militeristik dan budaya industri di masa ledakan ekonomi pada dekade 1980-an dan 1990-an.

UKSW menjadi semakin elitis daripada yang mungkin diinginkannya sendiri. Skala birokrasinya membengkak hingga ke batas kritis dan pergaulan antar-staf menjadi jauh lebih formal kelembagaan, profesional, dan global daripada yang dapat dikelola oleh pimpinan\* administrasinya. Semua faktor

---

\* Pada bagian ini sengaja digunakan istilah 'pimpinan', dan bukan 'pemimpin', karena inilah istilah administratif yang resmi dan baku di lingkungan UKSW—*peny.*

iniilah yang mendorong pertikaian sengit pada pertengahan 1990-an. Ironisnya hal ini terjadi sebagai akibat yang tak terelakkan dari keberhasilan dan pertumbuhan yang terlalu pesat. Dalam sejarah Indonesia konflik ini belum pernah ada duanya baik dalam hal jenis maupun lingkupnya.

Singkat cerita, konflik UKSW merupakan kasus tentang ketidakmampuan (barangkali ketidakmungkinan) jajaran administrasi yang relatif sederhana dan tua untuk menanggapi pertumbuhan pesat lembaga itu sendiri. Dalam ukuran kalender, birokrasi administratif itu tidaklah terlalu tua. Usianya baru sekitar setengah abad. Namun, secara fungsional dia mendadak uzur dalam rentang waktu yang pendek. Ketika pimpinan UKSW mencoba menanggapi berbagai perubahan ini dan berupaya mempertahankan kendali, usaha mereka masih dibayangi berbagai asumsi dan kerangka pikir lama.<sup>15</sup> Hal ini terbukti bukan hanya tidak manjur, tetapi malah memperparah keadaan. Konflik yang kelihatannya lokal ini bukan hanya terkait dengan bermacam kontradiksi sosial yang lebih luas, tetapi juga, dalam pendapat saya, merupakan pendahuluan apa yang melanda Indonesia setelah krisis ekonomi 1997 dan berakhirnya otoriterisme Soeharto pada 1998.

Pemicu resmi konflik UKSW adalah pemilihan rektor baru. Dalam prosedur yang mungkin tampak amat ‘demokratis’, seorang rektor (seperti halnya dekan dan ketua jurusan) di universitas swasta ini biasanya dipilih oleh semua anggota civitas akademika, termasuk staf tata-usaha. Tradisi ini mungkin lebih tepat disebut ‘komunitarian’ daripada ‘demokratis’. Hingga 1993, prosedur pemilihan semacam itu tidak diwarnai persaingan. Selalu hanya ada satu calon tunggal yang populer dan sangat dihormati. Sistem pemilihan

itu telah mapan dalam norma maupun praktik di lingkungan civitas akademik.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah UKSW, pemilihan rektor pada 1993 menampilkan dua calon yang sangat berbeda.<sup>16</sup> Baik proses pemilihan maupun hasilnya mengakibatkan pertentangan serius. Pihak yang kalah berpendapat bahwa aturan yang ada telah ketinggalan zaman dan perlu diubah. Sayangnya, permintaan itu muncul setelah mereka terbukti kalah. Malahan kelompok ini kalah lagi dalam pemilihan putaran kedua setelah aturan pemilihan diamandemen. Akan tetapi, Dewan Pengurus, yakni Yayasan Pendiri UKSW, memutuskan untuk mempertahankan dan mengangkat calon yang kalah. Hal ini memicu kemarahan mayoritas wakil-wakil unit dan pemilih yang menuduh bahwa kelompok yang kalah telah mengkhianati kesepakatan dan aturan-main yang sudah mapan. Namun, semua ini hanyalah sepenggal dari pertentangan dua kelompok internal yang telah berlangsung paling tidak selama sepuluh tahun.

Dies Natalis universitas senantiasa merupakan peristiwa terpenting bagi segenap civitas akademika. Pada 1993, Dies Natalis UKSW bersamaan waktunya dengan pelantikan rektor baru. Semua dekan (kecuali Dekan Fakultas Ekonomi) memboikot acara Dies itu. Bukan sekadar memboikot, yang menyebabkan sebagian besar kursi deretan paling depan di dalam aula universitas kosong secara memalukan, para dekan itu malah bergabung dengan aksi protes yang dilancarkan oleh ratusan mahasiswa dan staf pengajar di luar gedung pertemuan tersebut. Baru kali itulah dalam sejarah UKSW acara Dies Natalis dijaga ketat oleh aparat keamanan negara. Sejumlah saksi menuturkan bahwa acara itu juga dijaga beberapa preman. Para preman itu didatangkan dari



Semarang, yang sebagian besar anggota dan ketuanya berasal dari etnis yang sama atau dekat dengan rektor yang baru dilantik. Oleh karena itu, sulit sekali membatasi pertikaian itu tetap hanya melibatkan warga kampus. Dalam tahun berikutnya, para anggota civitas akademika yang membangkang menyelenggarakan kebaktian dan Dies Natalis tandingan di saat berlangsungnya Dies Natalis yang resmi. Sebagaimana dapat diramalkan, Dies Natalis yang tidak resmi menarik lebih banyak peserta. Tetapi, sebelum berakhir Dies Natalis tandingan ini diserbu sejumlah pria berbadan kekar yang tampak asing bagi warga kampus.<sup>17</sup>

Tidak seperti konflik-konflik sebelumnya entah di kampus ini atau di kampus-kampus lain di Indonesia, kritik dan kritik-tandingan perihal pemilihan rektor ini senantiasa muncul di media massa. Bagi pihak Yayasan, yang agaknya kurang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat luas, pertikaian yang dibawa ke media massa itu kurang bisa diterima. Sebagai balasan terhadap serangan populer atas keputusannya di media massa, pihak Yayasan menerbitkan surat teguran resmi dan ancaman litigasi kepada sejumlah dosen, dan kemudian memecat Arief Budiman 'secara tidak hormat'. Pada waktu itu Arief Budiman adalah selebritas intelektual dalam bonanza industri media.<sup>18</sup> Sesungguhnya, sebelum Arief bergabung dengan UKSW pada 1980 universitas ini kurang mendapat liputan media. Berbagai wawancara dengan Arief tentang isu-isu yang sedang aktual secara teratur muncul di halaman-halaman depan berbagai media massa besar, dan jelas ini membuat UKSW menjadi terkenal di seluruh negeri.

Alih-alih mengakhiri kontroversi, pemecatan Arief Budiman malah memicu kemarahan lebih besar, bukan hanya

di kalangan warga kampus tetapi berbagai pihak dan individu jauh di luar kampus. Sebagian besar staf pengajar di berbagai fakultas mogok mengajar. Bukannya kampus itu ditinggalkan kosong, halaman kampus malah diduduki oleh sejumlah mahasiswa yang telah mendirikan tenda-tenda sebagai tanda protes kepada Yayasan. Berbagai spanduk protes mengubah wajah kampus. Panggung untuk pementasan protes harian didirikan, dan dalam salah satu kesempatan acara itu menggunakan *sound system* yang sangat kuat.<sup>19</sup> Sejumlah dekan dan dosen senior mogok mengajar. Konflik berlangsung lebih daripada dua tahun, membelah warga kampus ke dalam dua kubu, mulai dari tingkat pengurus Yayasan hingga pesuruh harian dan mahasiswa.

Suatu aliansi berbagai kelompok mahasiswa dan staf pengajar UKSW yang menamakan diri KPD (Kelompok Pro-Demokrasi) menolak pengangkatan rektor baru dan menuntut Yayasan meminta maaf atas pemecatan Arief serta mencabut surat pemecatan itu. Mereka ini merupakan kelompok yang mengklaim telah menang total dalam dua putaran pemilihan rektor. Di lain pihak kelompok mahasiswa dan staf pengajar yang jauh lebih kecil berdemonstrasi mempertahankan pengangkatan rektor baru dan mendukung pemecatan Arief.

Selama dua tahun pertikaian terjadi di berbagai medan: lobi-lobi, perundingan resmi, petisi, pamflet gelap, ancaman telepon, kekerasan jalanan, tuntutan hukum, perang media, dan demonstrasi jalanan. Aksi mogok umum dilancarkan selama delapan bulan tanpa henti oleh sebagian besar mahasiswa serta staf pengajar dan administrasi. Aksi ini melumpuhkan lembaga perguruan tinggi tersebut sebelum terjadi eksodus besar-besaran di kalangan mahasiswa maupun dosen

di penghujung 1995. Sayangnya, antara lain karena tuntutan pasar, hanya sebagian dosen dan mahasiswa yang berkualitas yang dengan mudah mendapatkan pilihan untuk pindah pekerjaan atau pendidikan lain.<sup>20</sup>

Yang memungkinkan pertikaian itu terjadi begitu dramatis pada 1993 bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Konflik itu meledak sebagai akibat dari serangkaian pertentangan baik di dalam maupun di luar UKSW. UKSW telah terpolarisasikan pada akhir 1980-an, dan perpecahan ini merupakan kepanjangan maupun respon terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar Universitas. Di antara dua kelompok utama yang saling bertentangan tidak ada yang secara khusus mewakili kepentingan misi-misi Kristen lama yang menjadi landasan didirikannya Universitas, walau ada sekelompok loyalis terhadap misi ini yang berada di pinggiran. Dalam panggung utama pertentangan ada kelompok yang menamakan diri 'kaum realis' di satu pihak,<sup>21</sup> dan di lain pihak mereka yang menamakan diri kaum intelektual dan aktivis 'pro-demokrasi', yang banyak di antaranya berperan penting dalam KPD.

Beberapa dari kelompok pertama bergabung atau sekadar ikut-ikutan arus-utama tatanan industri kapitalis. Memang ada tekanan kuat yang memaksa, juga undangan yang menggiurkan dari luar lembaga terhadap sejumlah staf akademik untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan. Banyak di antara proyek ini, seperti halnya pemerintah itu sendiri, memerlukan kepakaran maupun legitimasi simbolik kalangan akademik. Jelas pihak akademikus maupun pemerintah mempunyai hasrat yang sama kuat untuk mendapatkan imbalan yang menguntungkan dari kerjasama seperti itu, entah secara material ataupun semacam perlindungan politis.

Semakin lama semakin banyak staf akademik yang terlibat dalam proyek-proyek penelitian resmi di bawah pengawasan pemerintah dan pengusaha, baik nasional maupun asing. Gejala serupa juga terjadi di lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya. Yang agak tak lazim di UKSW adalah keterbukaannya terhadap transformasi sosial baru ini dan semangat kewirausahaan Protestannya (atau tiadanya hubungan kepangkatan yang neo-feodalistik yang merintang hal serupa di sebagian besar universitas negeri).

Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, para pejabat militer, sipil, dan wakil-wakil perusahaan besar diundang untuk terlibat dalam kehidupan kampus. Misalnya, mereka mensponsori kegiatan-kegiatan olah raga dan kesenian atau menyajikan makalah seminar. Kelompok *marching band* tentara setempat ambil bagian dalam upacara-upacara kampus. Staf pengajar mendapat penghasilan tambahan cukup besar dengan bertindak sebagai konsultan dalam berbagai proyek di luar Universitas, dan secara serius hal ini menggerogoti loyalitas lama terhadap UKSW. Para mahasiswa dari beberapa disiplin ilmu mendapat kesempatan kerja yang menarik di dunia industri setelah—ada yang bahkan sebelum—lulus. Sebelum dekade 1970-an, ketika kehidupan kampus masih berskala kecil, sederhana, lokal, *ndesani*, dan religius komunal, berbagai perkembangan semacam ini tak terbayangkan.<sup>22</sup>

Pada akhir 1980-an UKSW memiliki citra yang flamboyan. Ironisnya, reputasi UKSW semakin mencuat karena sejumlah alasan yang berlawanan. Ekspansi kapital di Indonesia yang begitu agresif menumbuhkan kelas-kelas marjinal baru di daerah industri di perkotaan maupun gerakan pro-rakyat jelata di kalangan kelas-menengah perkotaan. Radi-

kalisme dan gerakan intelektual itu tampak kuat terutama pada dekade 1980-an ketika represi politik sedang pada titik puncaknya dan konfrontasi total merupakan tindakan bunuh-diri. Pada mulanya pembangkangan itu berlangsung di bawah tanah, tetapi pada 1990-an semakin berani menampilkan sosoknya.

Kapitalisme Indonesia semenjak dekade 1980-an melipat-gandakan jumlah pertikaian industrial dan perburuan yang tidak punya perwakilan atau jalan lainnya dalam sistem hukum dan politik yang berlaku (lihat Bab 3 dan 4). Frustrasi ini, walau ditahan-tahan, dan percaya diri yang tumbuh di kalangan kelas-menengah selama kurun waktu itu tidak jauh berbeda dari perkembangan di Malaysia pada akhir 1990-an (lihat Bab 5 dan 7). Semangat pembelaan bagi kaum tertindas di Indonesia dan Malaysia mempunyai sejarah yang terlalu kompleks untuk dibahas di sini. Cukup dicatat bahwa semangat itu dapat dirumuskan sebagai kesadaran, wacana, dan tindakan-tindakan kaum intelektual perkotaan, yang menikmati hak-hak istimewa, yang menampilkan keberpihakan pada kelompok-kelompok sosial yang dilecehkan.<sup>23</sup> Beberapa aktivis pembela kaum jelata yang cukup menonjol di Indonesia berada di UKSW, misalnya Arief Budiman dan George Junus Aditjondro.<sup>24</sup> Dengan demikian pada saat konflik internal meledak, UKSW memperoleh momentum untuk menjadi penting secara politis. Pandangan-pandangannya yang liberal dan kosmopolitan serta jarak geografis dan politisnya yang jauh dari Ibukota negara turut mencegah ko-optasi pemerintah sebagaimana terjadi pada perkembangan serupa di kampus-kampus lain.<sup>25</sup>

Buku-buku terlarang bukan hanya tersedia di perpustakaan-perpustakaan UKSW—yang cukup menarik minat

para mahasiswa dari universitas-universitas lain—tetapi juga menjadi bacaan wajib dalam sejumlah mata kuliah. Para pembangkang dari berbagai tempat diundang untuk berce-ramah atau menampilkan pertunjukan kesenian di kampus. Aktivis serikat buruh, aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur, para feminis, pengacara sekaligus aktivis, dan aktivis lingkungan yang radikal menemukan simpatisan dan rekan seperjuangan di kampus ini. Beberapa tokoh perintis gerakan mahasiswa pasca-1978 berkuliah di universitas ini. Dalam sejumlah kasus, aparat militer setempat baik di tingkat Kodim dan Kodam mengeluarkan peringatan-peringatan yang mengancam kepada para aktivis mahasiswa UKSW. Beberapa aktivis mahasiswa dan dosen terlibat dalam sejumlah pertikaian dan pengadilan politik.

Ada baiknya kita renungkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Chandra Muzaffar dan rekan-rekannya di Malaysia tentang sosok aktivis yang tak kenal kompromi dari kalangan intelektual. Apa yang terjadi di Salatiga dan kemudian Indonesia bukanlah sesuatu yang ‘alami’ atau ‘normal’. Hal itu tidak selalu terjadi. Daripada mempersoalkan mengapa nyaris tidak ada kemurkaan moral di kalangan kaum intelektual dan profesional Malaysia pada awal 1999, kita lebih baik mempertanyakan mengapa dan bagaimana bisa muncul kemarahan moral di Salatiga pada pertengahan 1990-an dan di Indonesia pada akhir 1990-an. Sama pentingnya mempertanyakan mengapa gelombang pembangkangan massa yang begitu kuat di Indonesia tidak terjadi pada 1980-an dan awal 1990-an. Kita juga perlu bertanya, dalam kondisi-kondisi macam apa orang Malaysia akan memutuskan untuk melancarkan tekanan guna menciptakan perubahan-perubahan yang lebih radikal.

Para aktivis intelektual UKSW, seperti halnya rekannya di lain tempat, samasekali tidak miskin secara finansial dan bukan kaum yang tak berdaya secara politik. Mereka memiliki jaringan internasional yang kuat. Sebetulnya banyak di antara tokoh-tokoh ini mendapatkan lebih daripada sekadar kepercayaan moral dan politik dalam melakukan pembangkangan yang sangat riskan terhadap kediktatoran militer dan kapitalisme kroni. Mereka juga menikmati dukungan kelembagaan dari berbagai jaringan nasional dan internasional dalam apa yang disebut gerakan sosial baru. Seperti halnya lawan-lawan mereka dalam institusi akademik yang sama, kaum intelektual pembangkang ini menikmati sejumlah hak istimewa yang tidak mereka ciptakan sendiri, dan tidak mungkin dinikmati oleh golongan miskin yang merupakan kelompok mayoritas penduduk Indonesia. Hak istimewa mereka antara lain adalah kesempatan untuk mobilitas yang lebih tinggi, pandangan hidup yang lebih kosmopolitan, jaringan eksternal yang lebih luas, memiliki lebih banyak pilihan karir dan kurang tergantung pada lembaga tempat mereka bekerja dibandingkan dengan komunitas akademik sebelum 1970-an. Berkat percaya-diri dan kekuasaan yang baru ini, serta berkat sumber penghasilan tambahan dan martabat tidak tergantung pada jaringan patronase lama UKSW, tidak mengherankan bahwa kelompok akademikus ini lebih siap menentang atasan mereka dan menghadapi pemecatan dibandingkan para pendahulu mereka.

Situasi ini bukanlah tidak berlaku untuk seluruh Indonesia, walau juga tidak sepenuhnya khas UKSW. Situasi semacam ini merupakan hal yang langka di Malaysia dalam kurun waktu lama walau kemudian berkembang pesat dengan dinamikanya sendiri. Di Malaysia, seperti halnya di Indonesia,

kemurnian atau keberanian moral tidak pernah merupakan faktor tunggal dan menentukan. Selama satu generasi lebih, kaum akademikus Malaysia mendapat gaji lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik. Tetapi, mereka kehilangan otonomi, karena kelompok yang berkuasa beserta jaringan lembaga mereka yang merajalela menjadi pemberi kerja dan pengayom utama bagi banyak di antara mereka.

Jika demikian halnya tidaklah terlalu sulit memahami mengapa pemilihan rektor di UKSW pada 1993 meledak menjadi konflik yang sengit dan berkepanjangan, dan melibatkan berbagai kekuatan dari luar kampus. Para calon rektor dalam pemilihan rektor 1993 itu mungkin tidak secara formal atau sepenuhnya mewakili kepentingan kedua kubu sebagaimana diuraikan di atas, tetapi jelas mereka bersimpati pada salah satu kubu yang bertikai dan diakui demikian oleh sebagian besar pendukung kubu masing-masing.<sup>26</sup> Seandainya salah satu kubu jauh lebih kuat daripada kubu lainnya, pertikaian mungkin segera bisa tuntas. Boleh jadi aksi pembangkangan samasekali tidak sampai terjadi. Bahwa konflik yang meluas dan seru berlangsung berlarut-larut mengindikasikan munculnya kekuatan-kekuatan yang relatif setara di masyarakat luas, yang turut mendukung kelompok-kelompok yang bertikai di UKSW. Keseimbangan kekuatan-kekuatan yang sama menjelaskan konflik-konflik berkepanjangan yang meretakkan kehidupan bangsa Indonesia di penghujung abad ke-20.

Kekuatan-kekuatan eksternal telah terlibat dalam konflik UKSW, sehingga peristiwa itu bermakna secara lebih luas. Kelompok-kelompok yang bertikai bukan hanya saling mengajukan tuntutan hukum. Industri media bukan hanya menemukan sumber berita-berita yang laik-jual dari kasus yang



kontroversial ini, apalagi karena tokoh utamanya Arief Budiman. Birokrat pemerintah dan militer berkepentingan terlibat pada kasus ini, antara lain karena salah satu tugas mereka menjaga keamanan dan ‘ketertiban sosial’, tetapi juga karena sengketa mereka yang sudah begitu lama dengan banyak aktivis pro-demokrasi di kampus itu.

Menariknya, entah mengapa, bahkan sikap berbagai lembaga negara terhadap konflik UKSW jelas tampak terpecah. Hal ini menjadikan masing-masing kelompok yang bertikai menyimpan harapan yang sebagian bersifat khayalan kosong akan memenangkan pertikaian. Alasan yang sama telah membuat pertikaian mereka berlangsung jauh lebih lama daripada yang diinginkan oleh semua pihak.<sup>27</sup> Saat itu friksi di kalangan elite politik Indonesia tampak cukup jelas bagi banyak orang Indonesia, tetapi yang tidak terduga adalah penampilannya di tingkat propinsi dan daerah, sampai dengan konflik UKSW muncul ke permukaan. Perpecahan yang cukup mendalam di kalangan aparatus negara—serta munculnya dan konsolidasi politik kelas-menengah pada 1990-an—adalah dua di antara sejumlah faktor penting jatuhnya pemerintahan Soeharto.

Kasus UKSW bukan sekadar persoalan internal. Hal ini menjadi lebih jelas jika ditilik dari proses politik nasional yang berkembang di seputar jatuhnya Soeharto yang dramatis dan peristiwa-peristiwa yang segera mengikutinya. Bagi mereka yang tahu persis tentang konflik UKSW, apa yang terjadi di Indonesia pada masa jatuhnya rezim Orde Baru penuh dengan paralelisme, dan bahkan pengulangan-pengulangan dalam skala yang lebih besar. Daftar paralelisme itu sangat panjang, tetapi beberapa hal yang mencolok antara lain: (a) konflik menemukan puncaknya pada persoalan yang secara

formal dan sempit tampil sebagai suksesi kepemimpinan eksekutif, walau kepentingan yang dipertaruhkan jauh lebih kompleks; (b) tampilnya aksi-aksi protes mahasiswa yang radikal dengan poster, demonstrasi, petisi, *happening art*, dan boikot menuntut diakhirinya *status quo* (lihat juga Bab 7); (c) penggunaan lambang-lambang dan slogan tertentu yang berdaya-tarik global seperti demokratisasi dan reformasi dalam aksi-aksi protes itu (lihat Bab 6); (d) dukungan kaum profesional dan pejabat pemerintah senior dari luar kampus terhadap aktivisme mahasiswa (lebih lanjut dalam Bab 3); (e) pentingnya peran liputan media yang berpihak bukan hanya dalam menyebarkan berita tetapi juga mengesahkan tuntutan-tuntutan perubahan di luar kerangka kelembagaan; (f) kepentingan-kepentingan pihak aparat keamanan yang sedang terbelah yang saling bertolak belakang; (g) penggunaan politik rasial dan agama (yang sedikit atau banyak) sebagai alat pengerahan massa atau mendiskreditkan lawan (lihat Bab 6 dan 7); dan (h) maraknya fitnah, kekerasan jalanan, pamflet gelap, pencemaran nama baik individu-individu tertentu.

Seperti halnya dengan semua perbandingan, yang tersaji di atas tentu saja ada batas-batasnya, sehingga paralelisme itu tidak perlu dibesar-besarkan. Suatu kontras yang jelas antara apa yang terjadi di Salatiga dan Jakarta adalah tetap bertahanya pimpinan UKSW dan jatuhnya Soeharto. Salah satu alasan penting perbedaan ini adalah waktu. Rektor UKSW yang tidak mendapat dukungan suara mayoritas civitas akademika berhasil melewati konflik (walau beberapa kali ia mencoba mengundurkan diri karena tekanan internal yang kuat), antara lain karena iklim politik makro dan pejabat pemerintah di Jakarta yang mendukungnya masih sangat kuat pada pertengahan 1990-an. Sulit membayangkan bahwa kon-

flik UKSW akan berakhir sama seandainya konflik itu pecah tidak lama sebelum atau sesudah pengunduran diri Soeharto.

Berlawanan dengan berbagai komentar populer di media massa, perlu dicatat bahwa konflik UKSW—serta pertumbuhan universitas itu sendiri—erat terkait dengan berbagai proses perubahan sosial yang lebih luas baik pada tingkat nasional maupun global. Konflik tersebut tidak bisa disempitkan semata-mata pada proses pemilihan rektor. Yang lebih penting, konflik ini bukan kisah tentang ‘tokoh yang baik’ melawan ‘tokoh yang jahat’, sebagaimana dilontarkan oleh masing-masing kelompok selama bertikai. Dalam berbagai hal konflik itu memperoleh tenaga, mengadopsi corak dan wataknya, dan menimbulkan akibat-akibatnya jauh di luar persoalan terdekat civitas akademika UKSW.

Pertikaian UKSW bukanlah hasil kerja suatu konspirasi eksternal atau intervensi langsung, sebagaimana dicurigai sejumlah orang.<sup>28</sup> Namun, konflik itu merupakan konsekuensi sejumlah perkembangan yang dapat dibedakan tapi saling terkait: (a) pertumbuhan institusional UKSW yang lebih pesat ketimbang yang mampu ditangani UKSW; (b) ekspansi kapitalisme yang gencar dan besar-besaran di Indonesia di bawah rezim militeris represif Orde Baru; (c) munculnya dan mengglobalnya kaum intelektual kelas-menengah baik yang konservatif maupun progresif; dan (d) semakin parahnya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, hak-hak buruh dan kaum perempuan, serta tindakan-tindakan pengingkaran dan kekerasan terhadap rakyat jelata yang lazim di tempat-tempat yang mengalami ekspansi kapitalisme industrial.<sup>29</sup> Kasus UKSW secara historis berada dalam konteks, dan terpagut dalam, politik nasional dan ekonomi global yang lebih luas. Kasus itu mengawali apa yang kemudian terjadi di

pusat pemerintahan Indonesia pada akhir 1990-an.

Satu generasi baru jurnalis secara penuh dan aktif terlibat dalam konflik UKSW sebagai pihak luar. Berikut ini akan saya bahas sejumlah alasan mengapa mereka terlibat di dalam konflik itu, tidak sekadar sebagai pengamat yang berjarak. Saya juga akan menunjukkan bahwa pergolakan-pergolakan besar yang dialami oleh akademikus Indonesia di UKSW bukanlah hal yang unik. Sebagai kelompok yang rentan terhadap kekuatan global serupa, kaum jurnalis mengalami tantangan-tantangan yang sangat mirip.

## Industrialisasi Media

Dalam suatu peristiwa yang kelihatannya terpisah, pada 21 Juni 1994 rezim Orde Baru mencabut SIUPP tiga mingguan Jakarta, yakni *TEMPO*, *Editor*, dan *DéTIK*.<sup>30</sup> Di bawah rezim Orde Baru pembredelan media massa secara sewenang-wenang sudah sering terjadi. Sebelum 1994 telah terjadi tidak kurang daripada tigapuluh kasus pencabutan SIUPP, untuk sementara atau selamanya. Yang membedakan pembredelan 1994 dari kasus-kasus sebelumnya adalah tanggapan kalangan yang langsung terkena dampaknya oleh keputusan pemerintah itu, dan lebih penting lagi, tanggapan khalayak umum. Tidak ada contoh yang lebih baik tentang hal ini daripada apa yang terjadi di Salatiga: kedua kelompok yang bertikai dalam konflik UKSW menghentikan pertikaian mereka selama satu atau dua hari, dan secara bersama-sama berdemonstrasi memprotes pembredelan tersebut, sebelum kemudian melanjutkan pertikaian mereka secara lebih sengit pada hari-hari berikutnya.

Pembredelan itu merupakan petunjuk yang baik menge-

nai sejumlah hal tentang Orde Baru dan industri media. Alih-alih memperlihatkan kedigdayaannya, pembredelan itu menampilkan ketakutan rezim Orde Baru atas sepak-terjang kaum intelektual kelas-menengah yang sedang tumbuh berikut basis kekuatan mereka, yakni media massa. Pembredelan itu juga menunjukkan adanya ketakutan yang serius atas perpecahan yang tak bisa didamaikan di kalangan elite yang berkuasa sendiri, yakni antara Presiden Soeharto dan sejumlah perwira militer senior. Terlepas dari apa yang menjadi motif pembredelan tiga mingguan itu, keputusan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah yang berwenang tidak memahami lagi realitas sosial yang ditandai dengan munculnya politik kelas-menengah yang luas, yang pada dasarnya merupakan produk industrialisasi. Hal ini tampak jelas dari kemarahan publik yang terjadi secara mengejutkan, termasuk bagi para pejabat pemerintah sendiri.

Dalam tulisan yang lain saya telah membahas secara lebih rinci tanggapan kelas-menengah terhadap pembredelan tiga mingguan itu dan makna politisnya (Heryanto 1996a: 245-53). Hal-hal yang penting dapat diringkas sebagai berikut: pertama, aksi-aksi demonstrasi dalam protes terhadap pembredelan tiga mingguan pada 1994 itu merupakan bentuk kemarahan publik secara nasional terhadap satu masalah tunggal yang berlangsung cukup lama dan terjadi ketika demonstrasi masih terlarang. Aksi-aksi demonstrasi sebelumnya terbatas pada lokasi tertentu pada isu-isu yang spesifik dan tidak saling berkaitan atau berumur pendek, walau beberapa demonstrasi cukup mendapat perhatian media massa karena diwarnai kekerasan. Kedua, aksi-aksi protes menentang pembredelan tiga mingguan itu dipimpin dan diikuti oleh kelas-menengah, walau peserta aksi ada juga yang

berasal dari kelas-bawah dan kelas-atas (untuk gejala serupa lihat Bab 6). Aksi-aksi protes itu boleh dikatakan sebagai peristiwa kelas-menengah karena itulah identitas paling menonjol dari para demonstran yang melintasi perbedaan-perbedaan etnis, jender, profesi, agama, atau orientasi ideologis. Ketiga, inilah pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru terjadi pembredelan media massa yang mempersatukan para jurnalis yang saling bersaing untuk melakukan aksi protes bersama, mempertahankan kepentingan perusahaan dan profesi mereka sendiri. Pada masa-masa sebelumnya, tekanan terhadap seseorang atau sekelompok jurnalis atau perusahaan media massa tidak dengan sendirinya mengundang aksi-aksi solidaritas sesama jurnalis. Lebih parah lagi, beberapa jurnalis atau perusahaan media massa mengambil keuntungan dari nasib buruk yang menimpa rekan dan sekaligus saingan mereka. Terakhir, inilah pertama kalinya pembredelan pers buru-buru diikuti dengan berbagai pernyataan maaf pejabat yang berwenang beberapa minggu sesudahnya, dan penawaran bersyarat untuk menerbitkan SIUPP baru sebagai pengganti tiga mingguan yang dibredel itu.

Selain mengungkapkan kemarahan dalam demonstrasi jalanan di berbagai kota di Indonesia, kelas-menengah perkotaan menggunakan momentum ini untuk meluncurkan serangkaian aksi yang secara historis baru dan berisiko tinggi. Untuk pertama kalinya di bawah Orde Baru, *TEMPO*, salah satu korban pembredelan pers, menggugat pemerintah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ribuan pembacanya memberikan kuasa kepada satu tim pengacara untuk melakukan gugatan *class action*, mirip dengan persatuan para orangtua mahasiswa UKSW yang dibentuk secara dadakan menggugat pimpinan UKSW atas kegagalan UKSW menye-

lenggarakan layanan pendidikan secara teratur. Mirip dengan nasib gugatan Arief secara hukum terhadap UKSW, *TEMPO* akhirnya memenangkan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) berkat perpecahan politik di dalam lembaga peradilan.<sup>31</sup>

Banyak di antara wartawan yang kehilangan pekerjaan mendirikan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sebagai tandingan organisasi kewartawanan yang direstui pemerintah, yakni PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Karena menjadi anggota AJI para wartawan dari media massa yang dibredel menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru.<sup>32</sup> Dalam suatu kasus, beberapa anggota AJI didakwa dan diadili karena menyelenggarakan pertemuan terbuka tanpa izin. AJI didukung oleh beberapa wartawan yang bekerja di media massa lain, yang mengalami ancaman atau pemecatan karena keterkaitan mereka dengan perhimpunan yang waktu itu masih terlarang. Sementara itu acara peringatan atas pembredelan 1994 menyegarkan ingatan publik, mengangkat semangat juang para anggota dan simpatisan AJI.

Ketika pemerintah menyelenggarakan Pemilu 1997, beberapa aktivis terkemuka dari media massa yang dibredel, bersama dengan sesama aktivis dari organisasi lain, mendirikan KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu), suatu komite independen pertama di negeri ini, sebagai tandingan terhadap Panitia Pengawas bentukan pemerintah. Walau mungkin tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya atau yang paling berjasa dalam kesuksesan pemilu 1999, KIPP adalah salah satu jerih-payah serius dan sistematis yang pertama selama lebih daripada tigapuluh tahun terakhir untuk menyelenggarakan pendidikan sipil dan politik yang diwujudkan dalam Pemilu di Indonesia. Pendidikan semacam

ini bukan hanya merongrong kemenangan yang telah direkayasa oleh rezim diktator sebelum Pemilu dimulai, tetapi juga mendidik publik yang cenderung hendak memboikot Pemilu atau menjadikan Pemilu sebagai ajang kekerasan jalanan (Heryanto 1996b). Selama berlangsungnya Pemilu 1999, sejumlah ornop mengikuti langkah KIPP dan meluncurkan kampanye secara nasional agar Pemilu terselenggara secara demokratis sekaligus memberikan pendidikan politik dan bernegara.<sup>33</sup> Sumbangan yang penting dan mirip datang dari kelompok-kelompok aktivis perempuan sebagaimana dibahas dalam Bab 6. Para aktivis Indonesia belajar pengalaman baru ini dari rekan sejawat mereka di Filipina dan Thailand, dan mereka semua mengilhami para aktivis Malaysia dalam mengantisipasi Pemilu pasca-Anwar pada 1999 yang sangat menentukan (lihat Bab 5 dan 6).

Berikut ini saya berupaya menunjukkan bahwa perkembangan di atas dapat terjadi di Indonesia karena sejumlah alasan yang mirip atau berkaitan dengan konflik bersejarah di UKSW. Saya akan membahas proses yang oleh para jurnalis Indonesia dan pengamat mereka lazimnya disebut 'industrialisasi' jurnalisme (lebih lanjut lihat Heryanto dan Adi 2002). Dalam dua bagian berikut akan dibahas kaitan erat antara para aktivis intelektual Indonesia (misalnya mereka yang di UKSW) dan jurnalis sezaman (misalnya mereka yang bekerja pada ketiga mingguan yang dibredel itu). Paralelisme maupun interaksi antara proses-proses yang membentuk pengalaman para akademikus (seperti mereka yang di UKSW), para jurnalis yang meliput kasus UKSW, dan para jurnalis media massa yang dibredel pada 1994 akan diuraikan dalam bagian yang menyusul.

Pada umumnya, nasionalisme tetap merupakan ideologi



yang terkuat di Indonesia (Heryanto 1990b: 290), seperti halnya etnisitas sebagai faktor paling menentukan dalam politik, ekonomi, dan budaya Malaysia (Mandal 1998b; Kahn 1996a, 1996b; Gomez dan Jomo 1997). Di Indonesia, ideologi nasionalis mungkin merupakan wacana yang paling awet, dikeramatkan, dan memiliki daya-tarik luas dibandingkan dengan wacana tentang Pancasila, agama, ras, atau pembangunan dan modernitas. Para pejabat negara sering berupaya melegitimasi dan memaksimalkan kedudukan mereka, wacana dan ideologi mereka, dengan mengklaim bahwa semua itu mereka kerjakan demi kepentingan 'bangsa', terlepas dari apapun yang dimaksudkan istilah ini bagi berbagai macam orang yang mengucapkannya. Berbagai kelompok oposisi terhadap pemerintah, serta beragam aktivisme non-pemerintah sama-sama mengandalkan kesucian wacana nasionalis untuk meluncurkan kegiatan dengan tujuan yang berbeda, dan tidak jarang saling bertentangan. Satu contoh yang menonjol adalah penggabungan keibuan dan kepedulian pada bangsa dalam analisis pada Bab 6 tentang aktivisme perempuan Indonesia pada 1998-1999. Baru sejak 1990 Islam mulai berhasil digunakan oleh rezim Soeharto dan kelompok-kelompok masyarakat lain untuk menandingi wacana nasionalis (Hefner 2000; Heryanto 199b: 173-6).<sup>34</sup> Proses semacam ini telah muncul di Malaysia pada 1980-an dan kini telah mapan (Bab 5).

Uraian di atas tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kapan saja orang Indonesia rela mengorbankan nyawanya untuk bangsanya.<sup>35</sup> Barangkali yang terjadi justru sebaliknya, sebagaimana tampak dalam konflik penuh kekerasan di kalangan sesama warga-negara sejak bangsa ini merdeka, dan belakangan dalam

serangkaian pembantaian antar-etnis pada 1996–1999 (lihat Bertrand 2001). Namun, argumentasi di atas menunjukkan adanya ortodoksi ideologi nasional yang tak tertandingi dalam kata-kata, ritus, slogan, dan sentimen-sentimen massa, meskipun praktiknya bisa berlawanan.

Saya merasa perlu menyinggung perihal status ideologi nasionalis karena jurnalis dan akademikus selama ini menjadi pengarang utama sejarah nasional dan wacana nasionalis, dan sekaligus menjadi tokoh utama kisah tersebut. Hampir tanpa terkecuali, pustaka sejarah bangsa memberikan tempat paling tinggi bagi peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kelas-menengah ini. Bahkan narasi ‘alternatif’ sejarah bangsa yang terkenal selama Orde Baru sekalipun tidak memberikan pengakuan dan penghormatan utama lebih kecil bagi jurnalis dan kaum intelektual akademis. Yang saya maksudkan adalah tetralogi Pramoedya Ananta Toer (1980a, 1980b, 1985, 1988) yang dengan berbagai jurus menjungkir-balikkan sejarah resmi.<sup>36</sup>

Penghormatan yang tinggi dan kekuasaan moral yang telah dinikmati kaum terpelajar dan pers sejak awal 1900-an terus berlanjut dan tak banyak berubah sampai akhir abad ke-20. Walaupun kaum cendekia Bumiputera di Malaya pada masa kolonial memiliki posisi yang mirip, status mereka dalam wacana nasionalis kemerdekaan Malaysia tidak diromantisasi seheroik rekan mereka di Indonesia. Karena banyak jurnalis perintis dalam sejarah Malaysia cenderung berideologi nasionalis kiri yang disisihkan kalau tidak disingkirkan oleh pemerintah kolonial Inggris maupun Malaysia sesudah merdeka, peran sejarah mereka di masa pasca-kolonial digambarkan secara samar jika bukan dihapuskan. Dalam banyak hal, sejarah konfrontasi kekerasan yang di-

alami orang Indonesia sebelum mencapai proklamasi kemerdekaan ikut mendorong terjadinya romantisasi kaum terpelajar dan media massa. Barangkali masa lampau ini juga menjadi rangsangan bagi nasionalisme yang menggebu-gebu yang sering telah menyulitkan sebagian orang Indonesia untuk menyadari kontradiksi ketika mereka terlibat dalam konflik kekerasan dengan saudara sebangsa dan setanahair.

Apa yang dikerjakan oleh banyak rezim otoriter kolonial dan pasca-kolonial justru semakin mengukuhkan mitos-mitos tersebut dengan melancarkan serangkaian tindakan penindasan (sensor ketat, pelarangan, pengadilan, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan) terhadap para sastrawan dan karya-karya mereka. Hal ini juga tampak lebih mencolok di Indonesia daripada di Malaysia. Penyiksaan terhadap Anwar Ibrahim di sel tahanan kepolisian lebih mengejutkan bagi orang Malaysia daripada bagi orang Indonesia. Namun dua dekade terakhir abad ke-20, bagi banyak masyarakat Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia, merupakan titik balik sejarah yang besar dan tak bisa dikembalikan.

Sejak 1980-an, para pengamat Indonesia terus-menerus mengeluh bahwa pers Indonesia mengalami perubahan besar-besaran dari 'pers perjuangan' ke 'pers industri'.<sup>37</sup> Proses serupa terjadi di Malaysia pada 1990-an dengan istilah 'korporatisasi' media (Loh dan Mustafa 1996a; Nain 1998). Walau pengertiannya bisa beragam dan sarat nuansa, gejala yang dapat diamati di Indonesia mengacu pada pandangan umum bahwa para wartawan cenderung berkompromi dengan kebenaran, keadilan, ketidakberpihakan, dan fungsi-fungsi informatif dalam upaya bertahan hidup di lingkungan persaingan pasar yang semakin mencekik serta tindakan-tindakan represif negara.

Kecaman semacam itu mungkin bermasalah karena terlalu meromantisasi sejarah pers di masa lampau dalam usaha menguatkan pendapat tentang masa kini. Banyak penganut pandangan semacam itu mengesampingkan sejarah awal institusi pers ketika ‘pers yang industri’ selama bertahun-tahun merupakan kelaziman, bukan penyimpangan (lihat Wibisiono 1993: 449-50). Generalisasi yang berlebihan mungkin bukan hanya menghasilkan nostalgia yang meleset tentang masa lalu, tetapi juga mendorong utopianisme yang tidak kritis. Dengan *sok* moralis, para pengecam ini berasumsi bahwa institusi media mempunyai lebih banyak pilihan dan kebebasan daripada yang sesungguhnya terjadi. Mereka juga membuat gambaran tentang industri media serta daya cerna pembaca secara sangat monolitik. Kasus pembredelan tiga mingguan pada 1994 dan tanggapan publik terhadapnya menunjukkan kelemahan kritik yang galak tetapi tidak tepat terhadap pers industri.

Walaupun tidak menunjuk pada kenyataan yang ada, keluhan tak ada hentinya itu sedikit-banyak menegaskan berlanjutnya kepercayaan umum dan harapan mereka tentang apa yang dapat dan seharusnya dikerjakan oleh para akademikus dan jurnalis. Walaupun apa yang mereka katakan ada benarnya (seperti akan diuraikan di bawah nanti), para pengecam pers itu sesungguhnya mempertahankan ethos *pers perjuangan* di tengah demoralisasi, apatisme, kekecewaan, dan kebingungan, jika bukan oportunisme dan sikap asal-asalan, yang menyertai gegap-gempita industrialisasi yang berlangsung dalam dunia pers Indonesia dan Malaysia. Petisi yang disampaikan kepada pemerintah dan ditandatangani hampir oleh 600 wartawan media cetak Malaysia dari sebelas perusahaan surat kabar besar pada awal Mei 1999 merupakan ungkapan

putus-asa yang mewakili frustrasi masyarakat luas (Chen 1999).<sup>38</sup> Di Indonesia, di mana kebanyakan orang kurang percaya pada hukum dan lebih terbiasa dengan aksi-aksi ‘jalanan’, frustrasi semacam ini muncul dalam bentuk dan ungkapan berbeda.

Para pengamat telah mencatat dengan seksama bahwa selama kekuasaan Orde Baru, jumlah pembaca media terus-menerus meningkat, seiring dengan menurunnya jumlah pemilik media (lihat Dhakidae 1991: 324-85; David Hill 1994: 81-110; Hanazaki 1996: 135-54). Diperkirakan, ketika terjadi pembredelan 1994, *TEMPO* mempunyai tiras 200.000 eksemplar, *Editor* 60.000 eksemplar, dan *Detik*, tabloid terbesar di Indonesia, bertiras 600.000 eksemplar. Untuk pertama kalinya di Indonesia terjadi konglomerasi kelompok media, di mana kepemilikan duapuluh atau lebih perusahaan media terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara para konglomerat itu juga mendiversifikasikan kerajaan bisnis mereka ke bidang-bidang usaha lainnya (lihat David Hill 1994: 81-110; Sen dan Hill 2000: 54-64). Selama kurang lebih kurun waktu yang sama, sejumlah unit dan administrator di UKSW turut berjasa atas ekspansi lembaga pendidikan itu, sehingga pada awal 1980-an UKSW dan lembaga terkait menyelenggarakan pendidikan yang terakreditasi, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang program pasca-sarjana, di dalam kompleks yang sama.

Terlepas dari data statistik, saya mengamati hal-hal lain yang berkaitan dengan profesionalisasi dan etos kerja kewartawanan yang didorong pasar pada awal 1990-an. Para wartawan senior dari generasi yang tumbuh selama atau segera setelah berakhirnya Perang Dunia II semakin tergusur oleh ledakan kaum muda lulusan universitas dalam proses

rekrutmen yang profesional. Harian *Kompas*, salah satu dari dua harian dengan tiras terbesar di Asia Tenggara, baru mulai menyelenggarakan tes rekrutmen pada akhir 1981. Yang tidak kalah pentingnya, bagi para jurnalis generasi muda ini pengalaman kerja di dunia pers industrial dengan cepat selama ledakan ekonomi Orde Baru merupakan satu-satunya dunia jurnalistik yang mereka ketahui. Pada 1990, saya menjumpai mahasiswa tingkat akhir atau baru saja lulus yang menerima gaji sekitar satu juta rupiah (US\$500) sebulan sebagai koresponden lokal untuk harian dan mingguan nasional, ketika gaji pegawai negeri (termasuk dosen) dan tentara yang seusia dan berkualifikasi pendidikan setara dengan mereka hanya sekitar sepertiganya. Di Malaysia, kaum profesional Melayu muda di sektor-sektor formal juga merupakan generasi pertama warganegara dengan sejumlah hak istimewa yang hampir sepenuhnya dibentuk oleh *New Economic Policy* (1970-1990).<sup>39</sup> Mereka ini merupakan generasi pertama Orang Melayu (Kaya) Baru (lihat Shamsul 1999).

Terjadilah pergolakan dramatis tentang apa artinya menjadi seorang jurnalis (juga apa artinya menjadi warga Indonesia, Asia, kelompok jender dan etnis tertentu, atau konsumen). Semua itu terlampaui kompleks untuk dibahas di sini (lihat Young 1999), tetapi saya akan mencoba menangkap beberapa penggalan gejala tersebut. Dalam perbedaan dan kesenjangan yang semakin tajam dengan para pendahulu mereka, para jurnalis muda dan para senior mereka yang mampu mengikuti perubahan zaman terhempas dalam medan pertempuran baru—yakni medan pertempuran yang digerakkan oleh persaingan pasar. Mereka juga harus beradaptasi dengan gaya hidup golongan kaya baru yang semakin meluas: saling tukar kartu-nama, menggunakan perangkat-

lunak komputer paling mutakhir, sering berpergian ke luar negeri, mengendarai mobil, menghadiri acara-acara jamuan makan-malam di hotel-hotel berbintang-lima, menghadiri pesta-pesta mewah, dan karya-karya jurnalistik mereka menjadi lebih canggih atau genit dengan bentuk dan gaya, ketimbang isi. Sementara itu hiburan massa terus menjadi kiblat pers ketimbang pengabdian pada aspek pendidikan atau diskusi isu-isu publik yang serius. Menjelang awal 1990-an sudah menjadi hal yang lazim bagi seorang jurnalis muda dan kompeten untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, entah demi imbalan material yang lebih tinggi, integritas profesional, atau kemerdekaan-kerja yang lebih besar.

Dalam kurun waktu yang sama, para akademikus Indonesia seperti para staf UKSW memiliki peluang kerja dan pengembangan karir pribadi di banyak tempat di luar perguruan tinggi sendiri yang telah mengangkat martabat mereka. Bukan kebetulan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an untuk pertama kalinya di Indonesia terjadi fenomena baru perang iklan sekolah, perguruan tinggi, dan bimbingan tes serta majalah berita, surat kabar, dan bahkan program-program televisi. Sebelumnya institusi pendidikan dan media seperti halnya jasa kesehatan dan hukum memiliki citra publik yang terpisah dari, dan berada di luar, hukum ekonomi pasar yang mengejar laba. Sementara itu Universitas Malaya di-'korporasi'-kan hanya dua tahun sebelum keluarnya keputusan untuk mengakhiri kontrak kerja Chandra Muzaffar.

Industrialisasi yang pesat tidak dengan sendirinya mengumpulkan sisi radikal kaum jurnalis dan akademikus di Indonesia atau Malaysia. Makna politik konsumerisme dan gaya hidup *nouveau riche* (golongan kaya baru) jauh lebih tak

terduga daripada yang selama ini lazim dipahami umum (Heryanto 1999b). Memang, seiring dengan profesionalisasi, industrialisasi, dan internasionalisasi jurnalisme di Indonesia dan Malaysia, terjadi peningkatan ketidakpuasan. Tidak setiap orang menjadi hartawan, dan banyak yang merasa bahwa mereka belum memperoleh atau meraih sebanyak yang mereka anggap sudah menjadi hak mereka.

Walau tak bisa disangkal bahwa kebijakan dan prestasi Orde Baru di Indonesia dan Barisan Nasional di Malaysia lebih menguntungkan kelas-atas dan kelas-menengah perkotaan, mitos romantis lama tentang kaum intelektual kelas-menengah perkotaan yang tanpa pamrih masih menemukan pendukung berat di kalangan kelompok ini. Hal ini tampak mencolok pada tahun-tahun terakhir 1990-an, secara lintas-daerah dan budaya, serta etnis dan jender. Aktivisme politik ekstra-parlementer (seperti halnya beraneka ibadah keagamaan) mendadak marak selama terjadi ledakan ekonomi. Pada kurun waktu yang sama terjadi pertumbuhan ornop-ornop yang berjaringan internasional di Asia Tenggara.<sup>40</sup> Berbagai kaitan yang mendalam dan multisegi antara kaum jurnalis politis dan rekan intelektual mereka yang berada di kampus-kampus perlu ditelaah lebih rinci.

### **Aktivisme yang Semakin Profesional**

Aktivisme mahasiswa di Indonesia telah dibahas banyak orang. Yang kurang adalah pembahasan sejauh mana aktivisme semacam itu telah berhutang budi pada aktivisme kaum jurnalis secara individual dan institusi jurnalisme secara keseluruhan. Walaupun generalisasi bisa merugikan, dapat dikatakan bahwa pers mahasiswa merupakan salah satu lahan



rekrutmen para aktivis muda yang sangat penting. Pers mahasiswa juga sangat berjasa dalam pelatihan politik dan organisasi, pengembangan intelektual, kampanye, dan membuka jaringan dengan mereka yang berada di luar kampus. Hal ini terjadi terutama, tetapi tidak semata-mata, dalam berbagai periode ketika Orde Baru sedang dalam puncak kekuasaan dan penindasan; ketika demonstrasi jalanan merupakan tindakan konyol, dan pers komersial cenderung berpihak pada *status quo*. Dalam beberapa kasus, penerbitan mahasiswa merintis diskusi terbuka tentang isu-isu sensitif yang muncul dalam pers internasional, dan baru diulas pers domestik setelah Soeharto jatuh. Misalnya persoalan tentang kekayaan hasil korupsi mantan keluarga Cendana dan kroni-kroninya; diangkatnya lagi masalah hubungan antara kekuasaan negara dan Islam; dan penolakan doktrin Dwifungsi ABRI yang mengesahkan campur-tangan aktif militer dalam lembaga-lembaga sosial non-militer.<sup>41</sup>

Daya tahan pers mahasiswa tidak bisa dipahami tanpa melihat bantuan yang berlimpah dari para wartawan senior dan beberapa perusahaan media besar. Berbagai organisasi mahasiswa di kampus menyelenggarakan aneka acara pelatihan jurnalistik sering dengan bantuan keuangan dan nara-sumber dari perusahaan-perusahaan media yang sudah mapan. Ketika sedang menyiapkan penerbitan, para mahasiswa sering berada pada posisi yang lebih menguntungkan daripada banyak jurnalis media komersial. Sering ada hasil riset serius tapi sensitif yang sudah disiapkan para jurnalis senior tidak bisa dicetak di media massa mereka sendiri karena atasan mereka tak ingin ambil risiko. Karena dikejar-kejar publik, bahan-bahan semacam itu sering menemukan ruang publikasi di pers mahasiswa. Ketika perpecahan di lingkungan

elite politik Orde Baru menjadi parah, beberapa jenderal purnawirawan lebih suka diwawancarai wartawan asing atau wartawan mahasiswa yang tidak resmi daripada wartawan Indonesia dari media massa resmi. Semua ini membantu memperkuat daya-tarik publik dan pemasaran pers mahasiswa.

Lembaga pers komersial juga terus meraup sebagian hasil perkembangan ini. Mereka memiliki sarana untuk mengenali kader-kader wartawan yang paling berbakat. Tidak sedikit wartawan senior di berbagai perusahaan media massa utama (termasuk di tiga mingguan yang dibredel pada 1994) adalah mantan aktivis mahasiswa, bahkan ada juga yang pernah dipenjara karena aktivisme politik mereka. Oleh karena itu tidaklah sulit untuk memahami mengapa dalam merekrut staf baru mereka cenderung memilih para calon yang memiliki pengalaman aktivisme entah dalam demonstrasi jalanan atau pers kampus. Ini bukan sekadar nepotisme atau sentimentalisme aktivis. Jurnalisme di Indonesia merupakan karir yang penuh bahaya. Seperti halnya para aktivis mahasiswa, jurnalis di Indonesia kerap kali dihadapkan pada makiamian, intimidasi, ancaman dibunuh, penculikan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan (Luwarso 2000; Tesoro 2000; Suranto, et al, 1999: 61-79). Tahun demi tahun, dengan naiknya jenjang karir jurnalis-mantan-aktivis ini ke posisi yang penting dalam perusahaan media, mereka terus melanjutkan tradisi mendukung para adik-asuh mereka di lembaga pers mahasiswa.

Hubungan antara aktivisme mahasiswa dan jurnalistik tidak berhenti di situ. Para aktivis mahasiswa mendapat ruang yang cukup menonjol dalam pers komersial. Pers memberikan ruang cukup besar kepada mereka, karena para mahasiswa ini

memiliki hak-istimewa dan kewibawaan untuk menyatakan isu-isu yang ingin didengar khalayak dan yang tidak bisa disajikan kaum jurnalis dalam editorial mereka sendiri. Di negara-negara yang lebih liberal isu-isu ini biasanya tampil dan diperdebatkan terbuka di parlemen. Para aktivis mahasiswa mengungkapkan atau menjadi perantara bagi suara warga yang terbungkam yang tidak memiliki perwakilan di dalam lembaga-lembaga politik yang ada.<sup>42</sup> Hampir tanpa kecuali, para aktivis mahasiswa digambarkan di media massa sebagai pahlawan pro-demokrasi.

Apalah artinya demonstrasi jalanan tanpa diliput media. Para aktivis perempuan Indonesia sadar betul akan hal ini dalam berbagai aksi demonstrasi yang mereka gelar pada 1998-9 (lihat Bab 6). Demonstrasi jalanan, berapapun besar pesertanya, atau seberapa spektakuler sebagai aksi orasi, tidak dapat berlangsung lama dan tidak cukup berdaya mengubah peraturan-peraturan yang ada atau apalagi kekuasaan negara. Aksi-aksi itu sering efeknya kecil kecuali jika pesan-pesannya dilipat-gandakan dan diserap dalam kesadaran publik nasional melalui media massa. Demonstrasi jalanan paling jauh berfungsi seperti peluit. Agar berdampak lebih jauh, mereka harus menciptakan efek bola salju yang membangkitkan perbincangan resmi di kalangan pejabat negara, yang terkadang berada beberapa ratus kilometer dari tempat demonstrasi. Agar efektif, demonstrasi harus lulus ujian pertama, yakni masuk halaman-halaman media cetak atau ditayangkan di layar kaca televisi. Namun produksi media juga tunduk pada kaidah-kaidah dan logikanya sendiri. Tak peduli apakah seorang wartawan media massa bersimpati pada peristiwa demonstrasi, apa yang mereka sajikan harus diperiksa redaktur. Para mantan aktivis Indonesia sadar betul

akan hal ini, sehingga tempat, waktu, bunyi spanduk, atau yel-yel dan penampilan lainnya dalam suatu demonstrasi dengan cermat dipilih khusus untuk mendapat peliputan media secara maksimal (lihat juga Bab 6 dan 7).

Keakraban intelektual dan jurnalis berkembang lebih jauh. Yang berusia lebih tua daripada para aktivis mahasiswa, lebih sedikit jumlahnya, dan kurang galak dalam pemilihan kosa-kata tetapi tidak kalah pengaruhnya, adalah sejumlah ‘intelektual’ kritis. Mereka mungkin berprofesi sebagai seniman, akademikus, pengacara, atau rohaniwan. Pada saat yang sama mereka memainkan peran yang mirip dengan para aktivis mahasiswa dan membangun hubungan yang sama dekatnya dengan para jurnalis senior yang sadar-politik dari kalangan pers komersial. Para wartawan sering mewawancarai kelompok profesional kelas-menengah ini dan memuat kolom-kolom opini mereka. Para intelektual ini rajin menulis kolom karena sejumlah alasan, paling tidak karena honorinya merupakan penghasilan tambahan yang dibutuhkan sebagian besar akademikus untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menutup biaya penelitian.<sup>43</sup> Bukannya dibatasi menerima penghasilan dari luar, para dosen Indonesia yang menulis kolom di media massa secara tetap justru sering mendapat penghormatan dari lembaganya, dan di daerah tertentu mendapat insentif tambahan dari universitas tempat mereka mengajar. Para dosen yang secara kritis menggugat *status quo* lebih sering menerima pujian, ketenaran, dan perlindungan politik daripada serangan-balik.<sup>44</sup> Selalu lebih mudah bagi negara untuk bertindak keras terhadap pihak yang tidak dikenal.

Aktivis kelas-menengah Indonesia tidak bersepakat dalam banyak hal, dan sangat terpecah-pecah (lihat Uhlin 1997),

sebagaimana dengan jelas tampak dalam perpecahan di UKSW. Akan tetapi, represi sistematis negara Orde Baru telah memaksa mereka bersatu dalam lingkup terbatas untuk melawan musuh bersama, sebagaimana terlihat dalam protes terhadap pembredelan tiga mingguan pada 1994. Walaupun proses yang mirip juga terjadi secara bersamaan di beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, intensitasnya berkait dengan kemampuan pemerintah menyelundup atau merangkul profesi-profesi ini. Di Indonesia, entah karena kurangnya minat atau kemampuan, atau prioritas yang berbeda, Orde Baru memiliki kontrol yang terbatas atas pembentukan solidaritas kelas-menengah. Itulah sebabnya para jurnalis berbondong-bondong membela para akademikus atau aktivis mahasiswa ketika kelompok yang disebut belakangan ini diserang pemerintah. Dan sebaliknya, kita telah melihat aksi protes kelas-menengah di mana-mana dalam kasus pembredelan pers 1994.

Solidaritas semacam itu tidak tampak di Malaysia pada 1990-an. Walaupun pembatasan hukum dan tindakan ekstra-legal lebih kejam di Indonesia, para jurnalis dan jurnalisme arus-utama di Malaysia memiliki lebih sedikit pengalaman aktivis atau keterkaitan dengan para akademikus, ornop, atau aktivis mahasiswa. Dengan menguasai saham kepemilikan media, pemerintah Malaysia memiliki kendali politik yang lebih besar terhadap industri media. Hingga 1980-an, pemerintah Malaysia hampir memonopoli lembaga-lembaga pendidikan—khususnya pada tingkat tinggi pra-universitas—sedangkan di Indonesia selama bertahun-tahun jumlah sekolah swasta lebih besar daripada sekolah negeri. Pada 1980-an ada sekitar lima sekolah tinggi dan universitas swasta untuk setiap lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Bisa dime-

ngerti bila para jurnalis maupun akademikus di Malaysia memiliki ikatan yang lebih kuat dengan pemerintah dan ketergantungan pada pemerintah daripada di kalangan sesama mereka sendiri. Solidaritas horisontal semacam itu memang ada di kalangan beberapa kelompok (lebih jauh lihat Bab 3 dan 7), tetapi solidaritas yang berbasis nasional sulit dicapai karena kuatnya fragmentasi secara etnis, bahasa, dan agama (lebih jauh lihat Bab 5 dan 6). Hal ini menjelaskan kemarahan khalayak umum terhadap media arus-utama selama beberapa bulan pertama penahanan Anwar. Beberapa orang Malaysia yang marah melancarkan kampanye publik untuk memboikot media domestik. Yang lainnya bahkan sampai melakukan serangan fisik terhadap awak media yang disponsori pemerintah serta harta-benda milik mereka selama terjadi aksi demonstrasi jalanan dan pengadilan Anwar pada April 1999.

Secara panjang lebar saya telah membahas basis material aliansi ekonomi dan politik kaum akademikus dan jurnalis Indonesia. Sebelum mengakhiri bagian ini saya ingin menyinggung satu lagi wilayah diskusi, yang menekankan kebaruan maupun keakraban hubungan di antara media industri di Indonesia dan politik kaum profesional kelas-menengah, dengan kembali menengok diskusi tentang konflik UKSW. Telah saya sebutkan bahwa salah satu faktor baru yang berperan penting dalam perpecahan kelembagaan di sana adalah liputan media. Kalau dikatakan bahwa media melaporkannya secara mendalam, atau bahkan membesar-besarkan kasus ini, hal itu masih belum menggambarkan kenyataan yang ada. Salah satu hal yang paling memukau dalam kasus UKSW adalah kekuasaan media selama berlangsungnya konflik. Secara teknis, hal ini tidak mungkin terjadi di Indonesia

duapuluh atau bahkan limabelas tahun sebelumnya.

Pemecatan Arief yang cacat hukum menarik perhatian besar selama tiga tahun konflik UKSW. Secara resmi ia dipecat karena dituduh telah mencemarkan nama baik pimpinan Universitas dan memfitnah proses pemilihan rektor. Sebenarnya, kita tidak pernah tahu apa yang dikatakan oleh Arief. Yang kita ketahui hanyalah apa yang dilaporkan media tentang apa yang mungkin dikatakan oleh Arief selama diwawancarai tentang pemilihan rektor. Selama kurang lebih duapuluh bulan selanjutnya, pertikaian yang meluas antara kedua kubu terjadi di halaman-halaman media massa. Walaupun kampus UKSW kecil (jumlah mahasiswanya kurang daripada 7.000 orang), sebagian besar orang, termasuk tokoh-tokoh kunci dalam pertikaian, tidak dapat mengikuti perkembangan konflik dari hari ke hari secara langsung. Mereka harus mengandalkan laporan media hari itu yang telah diedit dan dicetak di kota-kota yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari kampus kecil tersebut. Selama kurun waktu dua tahun konflik, hampir-hampir tiada hari tanpa kehadiran berbagai koresponden yang berburu berita di kampus UKSW. Serangan dan serangan-balik muncul sebatas yang tersedia di halaman-halaman media. Mereka yang lebih mengenal seluk-beluk ruang media berada dalam posisi yang diuntungkan.

Karena KPD yang dianggap sebagai pembangkang jauh lebih dekat dengan pers (dalam hampir semua segi: secara pribadi, historis, kultural, dan ideologis), liputan media hampir seluruhnya bersimpati kepada mereka. Ini salah satu alasan kenapa protes mereka bisa berlangsung begitu lama. Walaupun tidak ada hubungan sebab-akibat yang tunggal dan langsung, pembredelan tiga mingguan terbitan Jakarta pada

1994 dalam batas tertentu merupakan pertanda kegagalan rezim otoriter menaklukkan, mengintimidasi, atau merangkul media; suatu kegagalan yang mendorong kejatuhannya. Malaysia pada 1999 menghadapi situasi agak berbeda, walaupun perbedaan ini tidak abadi. Setelah beberapa kali berkonfrontasi dengan media asing, Perdana Menteri Mahathir mendapat tantangan dari hampir 600 jurnalis yang memusuhinya dengan santun. Apakah kelas-menengah telah memenangkan satu langkah pertempuran? Barangkali tidak lama lagi kita akan menyaksikan apakah hal itu merupakan awal suatu akhir yang lebih besar.

### **Kesimpulan: Beberapa Tantangan ke Depan**

Bab ini mengkaji beberapa gugatan yang menggigit terhadap otoriterisme yang paling langgeng dalam masyarakat Asia Tenggara yang sedang mengalami industrialisasi. Berlawanan dengan teori-teori determinisme ekonomi, dalam kondisi tertentu kelas-menengah yang sedang tumbuh dapat berperan penting dalam menggugat otoriterisme yang bertahan lama di negeri mereka sendiri. Kekuatan politik kelas-menengah tidak bersumber dari status esensial kelas-menengah sebagai 'intelektual' sebagaimana digembar-gemborkan mitos yang umum di Indonesia atau Malaysia. Tidak juga berasal dari jerih-payah, kesengajaan, tekad individual mereka sendiri, serta jumlah atau kemampuan organisasional sebagaimana diajukan sejumlah pengamat lainnya.

Paling tidak ada dua pelajaran bisa dipetik dari kasus Indonesia sebagaimana dibahas di atas. Pertama, demokratisasi mensyaratkan lebih daripada sekadar perjuangan suka-rela, pengorbanan, dan martir di kalangan perintisnya.



Demokratisasi juga mensyaratkan kondisi-kondisi historis tertentu yang mendukung perjuangan semacam itu. Dua proses yang berkaitan tapi bisa dibedakan tampak turut membentuk kondisi semacam itu di Indonesia. Yang pertama adalah reproduksi yang terus-menerus dan tersebar luas tentang mitos intelektual publik sebagai pencari kebenaran tanpa pamrih sebagaimana dilekatkan pada mahasiswa, akademikus, dan aktivis jurnalis. Yang kedua adalah ekspansi industrialisasi kapitalis di bawah pemerintahan militeristik yang represif yang telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetapi mengorbankan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Momentum sejarah ini memang bersifat sangat transisional. Sebagaimana dikatakan oleh Hagen Koo (1991) dalam kaitannya dengan situasi serupa di Korea Selatan, peran penting aktivisme kelas-menengah yang nyata dan diangankan akan terus berubah dalam masa-masa mendatang.

Kedua, demokratisasi atau saudaranya, Reformasi, dapat berkembang secara lancar bilamana hal ini bukan sekadar rancangan besar atau kebijakan brilian elite politik yang bijak. Keasyikan mempersoalkan suksesi dan pertarungan elite politik di Indonesia dan Malaysia, yang mendominasi analisis arus-utama, mungkin kurang berharga daripada yang dikesankan. Hal yang sama juga berlaku dalam memandang kemajuan kaum perempuan semata-mata pada prestasi elite tertentu atau tokoh-tokoh kepahlawanan perempuan (lihat Bab 6). Watak demokratis yang tumbuh dalam kesadaran, wacana, dan tindakan sehari-hari pada skala kecil dan lokal merupakan landasan yang menentukan bagi suatu gerakan yang lebih besar ketika ada momentum yang tepat bagi berbagai kekuatan untuk berpadu (lihat Bab 3, 4, 6, dan 7).

Dalam keadaan demikian, organisasi yang rapi atau kepemimpinan formal tidak teramat penting. Di depan telah kita lihat bagaimana pandangan, tekad, dan tindakan mendukung demokratisasi dalam kehidupan kampus atau lingkup jurnalisme menjadi matang dalam pertikaian lokal. Sebetulnya banyak peristiwa serupa selama kurun waktu yang sama juga terjadi di berbagai organisasi sosial dan di sejumlah tempat di Indonesia (lihat Heryanto 1996a: 261, 1997a). Barangkali angin perubahan juga telah berhembus dalam kehidupan pribadi banyak orang Indonesia dan Malaysia.

Pembangunan industri yang tidak merata di Indonesia dan Malaysia jelas telah menguntungkan sekelompok penduduk dan merugikan yang lain. Kelas-menengah perkotaan jelas termasuk kelompok yang diuntungkan. Sebagian besar di antara mereka secara ekonomi telah diberdayakan, terlebih dalam wilayah budaya dan politik. Kita telah melihat tanggapan yang paradoksal dari beberapa kelas-menengah ini terhadap *status quo* yang telah memberikan hak-hak istimewa pada mereka; dan kemarahan para pemimpin otoriter seperti Mahathir pada akhir 2002 terhadap apa yang mereka anggap tindakan tidak tahu berterimakasih kelas-menengah yang secara diam-diam atau aktif mendukung Reformasi. Yang belum saya bahas di atas adalah kenyataan bahwa proses industrialisasi yang sama juga mengancam melucuti kekuatan kelas-menengah. Singkat kata, dan meminjam istilah dalam bagian pembukaan bab ini, mitos lama tentang aktivisme intelektual tanpa pamrih telah rapuh dan retak secara serius. Barangkali bukanlah kebetulan bila hal ini terjadi pada saat keterikatan nasionalisme yang dikeramatkan secara serius juga menghadapi gugatan (Kahn 1998: 18-24). Sebagaimana telah dibahas, nasionalisme Indonesia mengagung-agungkan

peran kaum intelektual kelas-menengah perkotaan. Walau jabatan dan status baru menjanjikan kenyamanan baru dan prospek karir yang menggiurkan, semua ini tidak dengan sendirinya mempertahankan otoritas moral yang dulu dinikmati kelas-menengah sebagai sesuatu yang wajar. Gambaran tentang era baru ini belum cukup jelas.

Pada 1994, pengurus UKSW ternyata telah kehilangan kesetiaan penuh yang selama beberapa dasawarsa sebelumnya diberikan para staf pengajar dan administrasi. Mereka terkejut ketika civitas akademika mengajukan gugatan dalam aksi yang waktu itu kelihatan tidak senonoh, yakni pemogokan umum. Sebaliknya para staf akademik dan administrasi juga kaget menyaksikan pengurus Universitas ternyata bukan lagi pengayom yang penuh welas asih, tetapi tidak lebih daripada majikan perusahaan. Tidak semua staf sama siapnya menghadapi ancaman baru, yakni pemecatan. Hubungan majikan-pegawai tiba-tiba tampil secara mencolok mengusur semangat gotong-royong yang pernah mengatur kehidupan kampus UKSW sejak awal didirikan.

Karena gerak industri modern dan gerak-tandingannya ini betul-betul hal yang baru dalam pengalaman (jika bukan kesadaran) pribadi banyak individu yang terlibat dalam konflik UKSW, keabsahan berbagai tindakan itu secara sengit diperdebatkan baik di dalam maupun di luar kampus. Banyak orang bertanya-tanya apakah secara moral bisa dibenarkan bila 'kaum intelektual' melakukan pemogokan. Pihak lain membela pemogokan sebagai aksi industrial tanpa kekerasan, yang bisa dibenarkan dan modern serta dilindungi hukum. Begitu pula, legitimasi pemecatan dosen tetap atas dasar pernyataan di media massa yang dituduh tidak tepat atau tidak santun secara seru dibahas dan diperdebatkan. Tidak

sedikit staf pengajar terkejut dengan pengumuman resmi dan baru yang mempersamakan intelektual dengan karyawan gajian. Hal-hal ini dan sejumlah pertanyaan etis lainnya butuh waktu lebih lama untuk masuk ke dalam perdebatan publik daripada derasnya lalu-lintas investasi, kebijakan ekonomi, atau proyek. Sekalipun terjadi pemulihan ekonomi dan perbaikan industrialisasi di Indonesia setelah krisis 1997-1998, industrialisasi yang pesat di Indonesia selama 1980-an dan 1990-an meninggalkan dampak yang mendalam dan bertahan lama pada kesadaran dan relasi sosial kelas-menengah perkotaan.

Sekalipun nasib buruk *TEMPO* berawal dari serangan kekuatan luar dari lembaga, dan tanggapan dari khalayak tampak merupakan aktivisme yang berbasis moral, tidak lama kemudian orang sadar bahwa pembredelan itu juga berarti kerugian finansial yang besar serta hilangnya lapangan kerja bagi ratusan pekerja yang berbakat dan tak bersalah, tanpa ada ganti rugi dan proses hukum. Dimensi industrial kejadian ini secara kasar tampak menonjol ketika pemerintah menawarkan surat izin terbit baru, dengan syarat *TEMPO* membentuk susunan manajemen dan pemegang saham baru—yang kesemuanya berasal dari kalangan pebisnis yang memiliki hubungan politik dekat dengan pemerintah. Staf *TEMPO* terpecah ke dalam dua kelompok. Separuh mengajukan gugatan hukum, yang waktu itu baru terjadi sekali dalam sejarah dan tampak tidak realistis. Secara teknis status hukum dan semua aktivitas yang berkaitan dengan *TEMPO* seharusnya ditangguhkan selama penyelidikan hukum. Separuh yang lain dengan nada membela diri menerima tawaran itu dan membantu menerbitkan mingguan baru *GATRA* yang mengambil-alih baik penampilan maupun gaya jurnanisme

*TEMPO*. Banyak dari wartawan yang melakukan kompromi ini berkilah dengan alasan kewajiban mereka memenuhi kebutuhan ekonomi agar keluarga tetap bertahan hidup (Heryanto dan Adi 2002).

Perhitungan ekonomi serupa berulang kali melemahkan upaya-upaya Kelompok Pro-Demokrasi, selama dan sebelum pemogokan umum di UKSW, yang berlangsung delapan bulan. Jelas tidak mungkin pernah ada jawaban akhir untuk menilai alasan masing-masing posisi. Juga tidak ada korelasi langsung antara daya tahan perlawanan dengan tingkat kemakmuran. Banyak dosen yang relatif makmur (memiliki lebih dari satu rumah bagus atau mobil bagus) di UKSW mengundurkan diri dari aksi protes pada masa-masa awal, dengan alasan bahwa mereka tidak sanggup menanggung biaya menantang pimpinan Universitas.

Dalam banyak hal perkembangan demokratisasi di Indonesia dan Malaysia di masa depan akan bergantung pada jawaban atas persoalan-persoalan ekonomi dan moral semacam itu. Radikalisme berbasis kelas-menengah di Indonesia pada 1998-1999 mungkin telah mengesankan kelas-menengah di Malaysia, sebagaimana terlihat dengan diimpornya istilah Reformasi dan KKN (lihat Bab 1).<sup>45</sup> Akan tetapi, sementara kelas-menengah Malaysia dan para aktivis pro-demokrasi melihat radikalisme kelas-menengah Indonesia dengan antusias, cepat atau lambat yang di Indonesia harus menjawab beberapa dari pertanyaan sulit tentang lapangan kerja dan demokratisasi yang telah memperlambat tantangan terhadap otoriterisme di Malaysia yang lebih industrial. Ada banyak hal yang perlu dipelajari masing-masing pihak dari tetangganya.

**Catatan:**

Penulis berterimakasih atas komentar beberapa orang yang belum tentu setuju dengan gagasan yang diutarakan di sini: Joel S. Kahn, Hong Lysa, Mary Zurbuchen, Kasian Tejapira, Maribeth Erb, Arief Budiman, Liek Wilardjo, Daniel Lev, Budiawan, Martin Richter, dan P.M. Laksono. Stanley Yoseph Adi Prasetyo dan Rungrawee Chalernsripinyorat telah membantu mencari beberapa referensi. Namun, semua kekurangan yang ada dalam bab ini tetap merupakan tanggungjawab penulis.

- <sup>1</sup> Pustaka yang paling relevan misalnya Crouch (1985), Hal Hill (1994), Jomo (1997), Gomez dan Jomo (1997), Jones (1994), Kahn (1996a), dan Robison (1986, 1996).
- <sup>2</sup> Tentang tinjauan pustaka mutakhir mengenai kelas-menengah Malaysia, lihat Abdul Rahman (2002). Mengenai kelas-menengah Indonesia, lihat Zulkarnain et al (1993), Zulkifli (1996), Prasetyantoko (1999), dan Hadijaya (1999). Bahan dalam beberapa paragraf mendatang pernah diulas dalam Heryanto (1990a). Koleksi esai yang pertama (dan satu-satunya dalam bahasa Inggris) tentang politik kelas-menengah Indonesia adalah Tanter dan Young (1990). Menurut Abdul Rahman (2002), tulisan-tulisan tentang kelas-menengah Malaysia telah tersebar dalam berbagai esai dan artikel, dan belum ada satu buku pun yang terbit tentang topik ini.
- <sup>3</sup> Saya telah bersikap kritis terhadap pandangan yang dominan dan meremehkan ini sejak awal perdebatan tentang kelas-menengah Indonesia di Indonesia (Heryanto 1990a, 1993b). Yang termasuk perkecualian dalam pandangan dominan ini misalnya K. Young (1990) dan Lev (1990) tentang kelas-menengah Indonesia, dan Kahn (1996a, 1996b) tentang kelas-menengah Malaysia.
- <sup>4</sup> Tak dapat disangkal bahwa tidak ada cara untuk secara obyektif, empiris, dan tepat menentukan seberapa 'besar' kekuasaan ekonomi atau birokrasi kelas-atas. Konsekuensinya, kita tidak pernah dapat menarik garis batas yang jelas yang memisahkan titik bawah kelas-atas dari titik atas kelas-menengah. Dalam kenyataannya kedua kelas ini mungkin bergerak secara ulang-alik dan berganti posisi. Dengan mengakui adanya wilayah abu-abu ini, kita masih bisa bergerak maju dengan analisa tentang beberapa segmen kelas-menengah yang berada pada peringkat 'tengah'. Saya merujuk pada mayoritas wartawan, mahasiswa dan dosen, serta sebagian besar seniman di Indonesia dan di Malaysia dewasa ini.
- <sup>5</sup> Joel Kahn (1996b) berpendapat, dan saya setuju, bahwa memiliki 'sesuatu' seperti gaji, kekayaan, pekerjaan, keterampilan, pengetahuan, atau kepakaran tertentu, tidak dengan sendirinya membuat seseorang

menjadi anggota kelas-menengah sebagaimana kita diskusikan di sini. Sebagaimana disarankan oleh Kasian Tejapira, apa yang membuat seseorang menjadi anggota kelas-menengah adalah aspek penampilan penggunaan pengetahuan dan keterampilan semacam itu dalam lingkungan publik tertentu yang berwibawa secara moral bagi tindakan dan pelaku tindakan semacam itu (komunikasi pribadi, email tertanggal 28 September 1999). Jadi pandangan yang diambil di sini menganggap 'tindakan' sosial yang secara historis bersifat spesifik lebih penting daripada 'benda-benda' [atribut-atribut kepemilikan suatu kelas sosial].

- <sup>6</sup> Dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia lebih ke-'Barat-barat'-an. Menggunakan model Gramscian, tatanan sosial di Malaysia lebih ditopang dengan konsensus daripada cara-cara koersif, sementara di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya. Paling tidak hingga pertengahan 1980-an, di Malaysia keadilan dan penegakan hukum lebih memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk mendisiplinkan warganegaranya daripada di Indonesia. Dapat dimengerti bila di Malaysia kaum aktivis, dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, lebih terhimpun dalam profesi hukum daripada di Indonesia.

Secara keseluruhan, Malaysia lebih industrial daripada Indonesia. Otoriterisme militeristik Indonesia di bawah Orde Baru begitu mudah dan sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam memelihara tatanan dan menindas perbedaan pendapat, tetapi ironisnya hal itu malah membiakkan kekerasan tandingan dan meradikalisasi para pembangkang. Perjuangan revolusioner yang lebih lama dalam melawan kolonialis asing dan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam memelihara ingatan romantis tentang perjuangan itu tak ada padanannya di Malaysia, yang kemerdekaannya diberikan daripada diperjuangkan. Ironisnya apa yang kita saksikan dalam gejolak 1998 dan 1999 menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Aparat keamanan di Malaysia lebih banyak menggunakan cara-cara kekerasan (yang disimbolkan dengan mata bengkok Anwar Ibrahim selama ditahan), sementara Indonesia menyelesaikan proses pemilihan umum secara damai walau ketika, atau justru karena, militer melangkah mundur dari politik.

- <sup>7</sup> Seorang feminis pria tidak pernah sama dengan seorang perempuan, seperti halnya seorang Malaysianis tidak sama dengan seorang Malaysia.
- <sup>8</sup> Kalau diperpanjang logika semacam itu agaknya juga berlaku bagi Megawati Sukarnoputri dan Anwar Ibrahim. Ketenaran mereka sebagai lambang penggerak Reformasi umumnya erat terkait bukan dengan usaha-usaha mereka sendiri, tetapi dengan tindakan-tindakan represif

yang ditimpakan oleh pemerintah yang berkuasa terhadap mereka. Daftar tokoh-tokoh serupa dapat diperpanjang hingga Aung San Suu Kyi, atau Benigno dan Corazon Aquino. Tak seorang pun dari tokoh-tokoh ini, bagaimanapun juga, mewakili apa yang kita pahami sebagai 'kelas-menengah' dalam bab ini.

- <sup>9</sup> Dua faktor sangat mencurigakan dalam penghentian kontrak kerjanya. Keputusan universitas itu dibuat sangat mendadak dan profesor itu hanya diberitahu kurang daripada seminggu sebelumnya. Alasan resmi keputusan itu adalah kendala anggaran universitas dan efisiensi administratif. Dalam konferensi persnya pada akhir Februari 1999, Chandra menyajikan fakta-fakta dan angka-angka yang berlawanan dengan alasan resmi atas pemecatannya. Rincian tentang kasus ini berikut tanggapan publik terhadapnya pernah tersedia (hingga 24 Desember 1999) di: [http://www.jaring.my/just/chandra\\_removal.htm](http://www.jaring.my/just/chandra_removal.htm)
- <sup>10</sup> Dalam suatu esai yang menggugat, Rustani Sani, seorang intelektual publik Malaysia terkemuka dan kawan dekat Chandra, menyatakan apa yang ia pandang sebagai dua kendala penting dalam menghambat Reformasi di Malaysia: mentalitas emigran (suatu kompleks rendah diri dan egoisme) yang melanda banyak, tetapi tidak semua, warga etnis Cina dan neo-feodalisme Melayu (Sani 1999).
- <sup>11</sup> Di dalam pesan yang sama (Zain 1999), penulis menambahkan: "Di negara-negara bebas lainnya, serangan setara terhadap kebebasan akademik untuk berbicara niscaya akan menimbulkan gelombang kontroversi besar sekurang-kurangnya di kalangan akademikus." Memang hal serupa terjadi di Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian selanjutnya, tetapi itu hanya terjadi dalam kondisi khusus yang terlalu rumit untuk diuraikan dalam e-mail.
- <sup>12</sup> Sebagai partisipan langsung dalam peristiwa-peristiwa yang akan saya bahas ini, saya berada dalam posisi yang menguntungkan sekaligus merugikan. Di satu sisi, saya mampu memberikan nuansa-nuansa kejadian yang kompleks tanpa menampilkannya secara eksplisit dalam catatan berikut ini. Di lain pihak, saya harus melawan godaan untuk menumpahkan rincian etnografis yang mungkin kurang relevan, sehingga mengabaikan kekuatan-kekuatan lebih besar dan gagal melakukan analisa kritis yang mensyaratkan suatu abstraksi yang mengambil jarak dan analitis. Saya putuskan untuk memaparkan latar depan struktur-struktur yang lebih besar dan dengan sadar mencoba menghindari penilaian moral terhadap posisi individu-individu yang terlibat di dalam konflik, tanpa berilusi menyajikan suatu catatan peristiwa yang sepenuhnya obyektif dan netral.



- <sup>13</sup> Dalam pertengahan 1970-an, karena tinggal di kota yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari UKSW, saya tidak mengetahui keberadaan universitas ini sampai beberapa minggu sebelum saya mencoba mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di situ. Saya mendaftar ke UKSW hanya karena saya tidak mampu membayar biaya masuk di fakultas teknik universitas yang lebih bergengsi di kota Malang, yang telah menerima lamaran saya. Saya diterima di UKSW setelah saya membayar biaya masuk seperlima biaya di universitas negeri itu. Dua dasawarsa kemudian perbandingannya terbalik. Beberapa pelamar terbaik yang lulus ujian seleksi masuk di UKSW harus membayar biaya masuk yang besarnya empat atau lima kali lipat biaya masuk di universitas negeri di Malang.
- <sup>14</sup> Sebagian besar universitas negeri menerapkan kuota untuk membatasi jumlah mahasiswa keturunan Cina. Konsekuensinya, kaum muda Indonesia keturunan Cina beramai-ramai masuk ke lembaga-lembaga pendidikan swasta atau studi ke luar negeri. Pada awal 1980-an, Rektor UKSW menyatakan bahwa UKSW memiliki jumlah mahasiswa etnis Cina dengan persentase terendah dibandingkan universitas-universitas Kristen lainnya.
- <sup>15</sup> Langkah-langkah ini termasuk nasihat kebapakan, ritus-ritus keagamaan, himbauan-himbauan moral, atau ancaman-ancaman. Daniel Dhakidae (1991: 388–98) menyajikan catatan yang lebih lengkap tentang proses serupa yang terjadi dalam industri media.
- <sup>16</sup> Sebagian pembaca mungkin telah tahu bahwa tidak lama setelah itu, untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum di Indonesia terdapat lebih daripada satu calon presiden dalam persaingan yang ketat. Malaysia telah melembagakan demokrasi elektoral terlebih dahulu. Selama rezim Orde Baru Soeharto, nominasi presiden alternatif terjadi lebih dari sekali, tetapi hal itu tidak pernah legal atau khalayak tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Kalaupun ada, calon tandingan itu umumnya dipandang sebagai bentuk simbol pembangkangan.
- <sup>17</sup> Kejadian ini perlu disebut karena penyelesaian konflik dengan cara serupa juga menonjol dalam panggung politik nasional Indonesia sebagaimana terjadi dalam serangkaian aksi kekerasan yang disponsori negara sejak 1993 di luar kawasan perang seperti Timor Timur, Papua Barat, dan Aceh.
- <sup>18</sup> Kebetulan Arief Budiman adalah sahabat Chandra Muzaffar. Pada 1984 Chandra mengunjungi UKSW dalam rangka menghadiri konferensi yang disiapkan Arief.
- <sup>19</sup> Pengambil-alihan ruang kampus yang dicapai dengan cara demikian mungkin mendorong digunakannya seni dan musik untuk tujuan serupa oleh para aktivis perempuan dan seni pada 1998-1999 (lihat Bab 6 dan 7).

- <sup>20</sup> Sejak 1995 ada usaha serius di kalangan sebagian dosen yang eksodus ini untuk bekerjasama dengan suatu konsorsium kelompok pengusaha besar di Semarang guna membuka universitas dengan sistem yang sepenuhnya baru. Seandainya gagasan ini terwujud, eksodus staf akademik dan administrasi mungkin bisa lebih besar dengan adanya kesempatan baru di tempat yang dekat UKSW. Sebelum perguruan tinggi ini berdiri, terjadi krisis ekonomi 1997 yang memporandakan proyek ini.
- <sup>21</sup> Beberapa tokoh utama kelompok ini menamakan diri mereka begitu, tetapi saya tidak yakin seberapa jauh pengertian semacam itu diterima oleh kalangan pendukung mereka.
- <sup>22</sup> Pada pertengahan 1970-an, satu-satunya 'ruang parkir' yang ada hanya untuk sepeda. Pada 1990-an, ruang parkir mobil tidak pernah cukup untuk menampung mobil-mobil mewah para mahasiswa. Pada pertengahan 1970-an sebagian besar perkuliahan dibuka dengan doa.
- <sup>23</sup> Untuk kajian tentang gerakan kerakyatan di Malaysia dewasa ini, lihat Kahn (1994, 1996a: 70) dan Abdul Rahman (2002); tentang kasus di Indonesia lihat Aspinall (1996), Heryanto (1989, 1996a, 1996c), dan Uhlin (1997).
- <sup>24</sup> Tidak lama setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, pada 1980 Arief Budiman memilih bergabung ke UKSW. Keputusannya yang tak diminta merupakan pengakuan yang penting bagi reputasi UKSW. Arief memiliki daya-tarik tersendiri bagi banyak akademikus dan dosen dari berbagai penjuru Indonesia. Sejumlah akademikus penting lainnya mengikuti jejaknya tidak lama setelah itu. Salah satunya adalah seorang lulusan Universitas Cornell, yakni George Junus Aditjondro. Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan, di mana Arief dan George menjadi sebagian staf inti, kemudian berkembang menjadi semakin dikenal baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagai pusat kajian akademik serta oase pemikiran liberal dan intelektualisme publik. Bagi pimpinan Universitas, Program Pasca-sarjana ini juga menjadi terlalu otonom untuk dikendalikan. Program Pasca-sarjana ini menjadi benteng pembangkangan dalam konflik internal UKSW sebagaimana akan dibahas di bawah ini. Baik Arief maupun George kemudian menjadi dosen di Australia tidak lama setelah meninggalkan UKSW, Arief pada 1997 dan George pada 1995. Setelah Soeharto dipaksa mundur pada 1998, George paling dikenal sebagai salah seorang peneliti yang paling tahu tentang kekayaan Soeharto, keluarganya beserta kroni-kroninya di seantero dunia (lihat Liebhold 1999; *Time* 1999).
- <sup>25</sup> Selama beberapa dasawarsa, aktivisme politik mahasiswa berbasis di kampus-kampus universitas negeri terkemuka seperti UI, ITB, atau UGM.

Tindakan-tindakan militer yang brutal di kampus-kampus, pelarangan semua badan mahasiswa yang independen, pendirian lembaga kemahasiswaan yang baru dan dengan ketat dikendalikan pemerintah mulai 1978, dan ko-optasi yang sistematis terhadap dosen-dosen muda telah membatasi pembangkangan yang sistematis dan terbuka di kampus-kampus selama satu dasawarsa lebih. Politik mahasiswa muncul kembali di panggung publik setelah 1989, namun dengan sosok yang berbeda dan agenda yang lebih radikal. Tidak seperti sebelumnya, gerakan-gerakan mahasiswa pada 1989 muncul dengan basis di universitas-universitas swasta yang jauh dari Ibukota. UKSW hanyalah salah satu dari yang banyak. UGM juga salah satu dari sedikit kampus tua yang melanjutkan tradisi aktivisme semacam itu. Sebagian besar gerakan-gerakan mahasiswa di Jakarta yang turut mendorong jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 berbasis di universitas-universitas swasta, dan Universitas Trisakti menjadi legendaris karena beberapa mahasiswanya tertembak mati dalam demonstrasi damai. Tidak seperti para pendahulunya, para aktivis mahasiswa pasca-1978 berasal dari keluarga berlatarbelakang lebih sederhana baik secara ekonomi, politis, atau kultural, dan secara teratur terkait dengan politik kelas-bawah, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Tidak seperti pendahulunya yang menuntut pemerintahan yang lebih bertanggungjawab, para aktivis ini menuntut perubahan politik yang lebih terbuka dan transformasi sosial. Akhirnya, perbedaan yang paling menonjol dibandingkan dengan gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya, mayoritas gerakan mahasiswa setelah 1978 secara sadar melewati sekat-sekat etnis dan agama. Hal ini serupa dengan yang muncul dalam protes-protes jalanan di Kuala Lumpur mulai 1998, dua puluh tahun setelah tidak ada aksi-aksi semacam itu.

<sup>26</sup> Liek Wilardjo, calon dari Kelompok Pro-Demokrasi, dikenal sebagai fisikawan dan salah seorang penentang yang gigih terhadap gagasan Menristek (waktu itu) Habibie tentang pembangunan proyek instalasi pembangkit nuklir di Jepara, Jawa Tengah.

<sup>27</sup> Argumentasi yang sama mungkin bisa dipakai dengan mengacu pada daya tahan Megawati Sukarnoputri hingga berakhirnya masa kepresidenan Soeharto.

<sup>28</sup> Sekurang-kurangnya dua desas-desus konspirasi beredar pada masa itu. Yang satu mencurigai bahwa pemerintah telah berhasil menghancurkan basis kelembagaan para pembangkang kritis, jika bukan universitas secara keseluruhan. Yang satunya lagi mencurigai adanya konspirasi unsur-unsur di dalam kelompok-kelompok sosial Islam yang baru tumbuh yang bersekutu dengan pemerintahan Soeharto (dan kemudian Habibie). Arief Budiman adalah seorang Muslim. Desas-desus semacam itu lebih

mencerminkan kecemasan mereka yang membuat dan mengedarkannya daripada kejadian-kejadiannya itu sendiri.

- <sup>29</sup> Kasus yang lebih terkenal dalam beberapa dasawarsa terakhir ini adalah industrialisasi yang pesat dan berkelanjutan di Cina, yang merupakan salah satu faktor terjadinya pembantaian di Tienanmen 4 Juni 1989.
- <sup>30</sup> Untuk bahasan yang lebih lengkap tentang pembredelan itu dan konteks historisnya, lihat Hanazaki (1996: 199-252).
- <sup>31</sup> Arief menang mutlak di lembaga peradilan, yang memerintahkan agar UKSW memenuhi semua tuntutan. Pimpinan UKSW naik banding sampai ke Mahkamah Agung (MA), tapi tetap kalah. Namun, UKSW menolak mematuhi perintah badan peradilan dan Arief tidak pernah menuntut pelaksanaan perintah badan peradilan tersebut. Di Jakarta *TEMPO* memenangkan gugatannya hanya sampai pada tingkat PTTUN. Tidak lama setelah Soeharto jatuh, majalah berita ini mendapatkan kembali surat izin terbitnya dan kemudian terbit kembali.
- <sup>32</sup> Para mahasiswa dan staf pengajar yang eksodus dari UKSW sebagai pembangkangan terhadap pimpinan universitas tersebut lebih mudah pindah ke universitas-universitas swasta seperti Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta.
- <sup>33</sup> Kesuksesan Pemilu 1999 memang telah diakui secara luas, tetapi tidak banyak pengamat yang memperhatikan berbagai upaya dan pengabdian ribuan pendidik politik. Ini tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya berjasa atas rendahnya tingkat kekerasan selama pemilu. Beberapa faktor lainnya juga harus diperhatikan, misalnya demoralisasi dan kecemasan yang meluas akan kemungkinan meledaknya pertikaian fisik sesuai pemilu, mengingat selama dua tahun lebih telah terjadi serangkaian kekerasan warga maupun negara.
- <sup>34</sup> Perbincangan tentang separatisme baik sebelum maupun terutama sesudah jatuhnya Soeharto tidak dengan sendirinya mematahkan argumentasi di atas. Yang terjadi bukan hanya kecemasan yang kuat akan adanya disintegrasi nasional, yang menegaskan apa yang didambakan atau apa yang ideal. Di kalangan mereka yang telah merasa tekanan imperialisme Jawa yang berkedudukan di Jakarta, tampaknya alternatif-alternatif yang dikehendaki berupa kemerdekaan bangsa-bangsa baru, dan bukan, katakanlah, anarki atau bentuk-bentuk lain sentimen pascanasional.
- <sup>35</sup> Teori Benedict Anderson tentang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan telah cukup terkenal di situ, antara lain, ia mencirikan sentimen nasionalis sebagai "persekutuan horisontal yang mendalam

...[yang telah memungkinkan] selama lebih daripada dua abad, berjuta-juta manusia, bukannya siap membunuh, tapi bersedia mati untuk bangsanya”(Anderson 1983: 16).

- <sup>36</sup> Contoh paling gamblang adalah penggambaran yang berlawanan tentang Budi Utomo dalam kedua narasi sejarah itu. Selama beberapa dasawarsa, secara resmi pemerintah menetapkan perkumpulan aristokrat Jawa ini sebagai organisasi modern pertama dengan tujuan nasionalis. Novel-novel Pramoedya, hasil riset selama hampir duapuluh tahun, menggambarkan organisasi ini pada dasarnya sebagai klub elite khusus untuk orang Jawa yang ditoleransi oleh rezim kolonial karena agenda-agendanya tidak mengancam pemerintah kolonial. Demikian pula berlawanan dengan teks resmi tentang pembentukan awal bangsa, narasi sejarah Pramoedya lebih memberikan perhatian pada jasa dan sumbangan kaum perempuan, kelompok bawah, Indo, dan etnis Cina.
- <sup>37</sup> Pandangan semacam itu dipaparkan secara baik dan lengkap dalam Yayasan Keluarga Bhakti (1993).
- <sup>38</sup> Para jurnalis Malaysia mengeluh tentang kewibawaan mereka yang merosot di mata khalayak. Mereka meminta lebih banyak kebebasan pers, dan menuntut pencabutan *the Printing Press and Publications Act* 1984. Di bawah Undang-Undang ini, perusahaan media harus memperbarui surat izin terbit setiap tahun, tergantung sejauh mana mereka mendukung pemerintah saat itu. Seperti sudah diduga sebelumnya, pemerintah tidak menampung gugatan yang sangat berani ini, yang tidak pernah muncul sejak pertengahan 1980-an ketika terjadi protes terhadap “amandemen [UU] yang memperluas kekuasaan *the Official Secrets Act*” (Chen 1999).
- <sup>39</sup> Ini mengacu pada kebijakan langkah afirmatif yang mendukung mayoritas etnis Melayu serta kelompok etnis yang secara resmi diklasifikasikan sebagai *Bumiputera* (lihat juga Bab 1) yang diluncurkan pada 1971 dan berakhir pada 1991. Namun kebijakan ini diperpanjang dengan sejumlah modifikasi.
- <sup>40</sup> Pada saat itulah Chandra Muzaffar mengunjungi UKSW sebagaimana disebut di depan.
- <sup>41</sup> Data dan argumentasi utama Richard Robison (1986) tentang kerajaan bisnis Soeharto dan keluarganya tersebar luas dalam bentuk fotokopi di kampus-kampus beberapa tahun sebelum hal itu menjadi kontroversi terbuka di Indonesia dengan terbitnya artikel David Jenkins di *The Sydney Morning Herald* pada 1986.
- <sup>42</sup> Situasinya agak berubah dengan jatuhnya Soeharto ketika pers komersial, partai politik, dan para anggota parlemen memiliki ruang yang lebih

longgar untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka (lihat Suranto et al 1999). Di Malaysia, jurnalisme alternatif dan oposisi menemukan ruang ekspresi mereka di Internet, berkat tersedianya sarana elektronik dan tiadanya ruang untuk mendistribusikan bahan secara tercetak. Perkembangan ini terjadi sebelum muncul kasus Anwar (lihat Mee 1998).

- <sup>43</sup> Dalam percakapan pribadi dengan seorang akademikus dari Bangkok pada pertengahan 1990-an, saya mendengar ada banyak kemiripan antara situasi di Indonesia dan Thailand mulai awal 1990-an. Di satu pihak, terjadi ledakan dan perkembangan pesat dalam industri media di kedua negara ini tanpa tersedianya sumberdaya manusia yang memadai. Di lain pihak, terjadi arus deras lulusan pasca-sarjana yang masih muda dan berbakat dari luar negeri, dan ternyata universitas tempat mereka mengajar tidak memberi insentif material yang memadai serta kurang memberikan tantangan akademik. Simbiosis antara industri media dan akademikus muda yang sangat energik belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa akademikus terkemuka di kedua negara ini bisa memperoleh imbalan tetap sebanyak lima kali lipat—mungkin lebih—gaji mereka sebagai dosen dari menulis kolom di media massa. Situasinya agak berbeda di Malaysia, di mana dosen memperoleh gaji yang lebih tinggi.
- <sup>44</sup> Jelas ada batas toleransi bagi kritik demikian, tetapi batas itu tidak pernah baku, sering (tapi tidak selalu dan sepenuhnya) seirama dengan iklim politik semasa.
- <sup>45</sup> Seruan Reformasi dalam aksi-aksi demonstrasi 1998-1999 bukan buatan para aktivis mahasiswa Indonesia. Penggunaan istilah ini tampaknya merupakan hasil pembicaraan diplomatik tingkat tinggi antara para pejabat IMF dan pemerintah Orde Baru mengacu pada sesuatu yang lebih radikal guna menekan Presiden Soeharto untuk mematuhi perjanjian yang telah disetujui. Namun, sekali lagi media massa memberikan bobot berat pada kata ini dalam wacana publik sehingga mahasiswa yang radikal tidak punya banyak pilihan kecuali ikut-ikutan menggunakannya untuk menyatakan aspirasi mereka secara efektif dengan massa. Bukan hanya sekali para aktivis Indonesia berupaya menggantikan istilah ini dengan kata-kata yang lebih radikal seperti 'transformasi' atau 'revolusi', tapi gagal. Hasil terbaik yang mereka capai adalah memopulerkan gagasan 'reformasi total', yang jelas merupakan suatu *contradictio in terminis*.